

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA DAN  
KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Kasus Pada Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



TIARA FAIKHA SUCI

1705046042

**AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: [febi.walisongo.ac.id](http://febi.walisongo.ac.id) – Email: [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Tiara Faikha Suci

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Tiara Faikha Suci

NIM : 1705046042

Fakultas /Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Alokasi Dana Desa, dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi ini dapat segera di munaqosahkan. Dengan harap menjadikan maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP:19690830 199403 2 003

Pembimbing II

Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP: 19850526 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: [febi.walisongo.ac.id](http://febi.walisongo.ac.id) – Email: [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Tiara Faikha Suci  
NIM : 1705046042  
Judul : **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Alokasi Dana Desa, dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: *Senin, 20 Desember 2021*. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021

Semarang, 3 Januari 2022

Ketua Sidang

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**

**NIP. 19730811 200003 1004**

Penguji 1

**Sokhikhatul Mawadah, M.E.I**

**NIP. 19850327 201801 2 003**

Pembimbing 1

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**

**NIP:19690830 199403 2 003**

Sekretaris Sidang

**Arif Afendi, S.E., M.Sc**

**NIP. 19850526 201503 1 002**

Penguji 2

**Warno, SE., M.Si**

**NIP. 19830721 201503 1 002**

Pembimbing 2

**Arif Afendi, S.E., M.Sc**

**NIP. 19850526 201503 1 002**

## **MOTTO**

*“untuk mendapatkan apa yang anda suka, pertama anda harus bersabar dengan apa yang anda benci”*

*( Imam Al Ghazali )*

*“banyak dari kegagalan hidup adalah karena mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah”*

*( Thomas A. Edison )*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat Nya berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan, keberkahan dan kesabaran dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Tak lupa sholawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur atas selesainya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, bapak Ahmad Idris dan ibu Siti Malikhah, yang selalu memberikan semangat, menghibur dan yang tak pernah putus doanya untuk memohon keberhasilan penulis dalam menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini. Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan selain terimakasih yang tak terhingga.
2. Adikku tersayang, Bintang Rizqil Baasith, yang selalu menjadi penyemangat. Semoga kita selalu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua.
3. Abah Ky. H Sodikin Safari dan umi Nurul Hikmah, yang selalu menuntun, memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan mendoakan keberhasilan penulis.
4. Tante kembarku Setiana Khairunnisa dan Setiani Zahratunnisa yang selalu sabar memberikan arahan, semangat, dan doanya.
5. Keluarga besarku, mbah Sholikin, mbah Jamiyah, mbah Khomsatun, tante Ima, tante Fifa sekeluarga, bi Fatonah sekeluarga, bi Nunung sekeluarga, uwa Mul sekeluarga, uwa Mamat sekeluarga, dan uwa Nyai sekeluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya.
6. Ita Tia Safitri dan Siti Maratus Solikhah yang telah banyak memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. teman-teman seperjuangan AKS A Novia, Rizki, Lala, Elsa, Nada, Isti, Imamah, Fataya, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih sudah menjadi keluarga di perantauan, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan.
8. Teman SMA ku Erna, Nonik, Julia, Vivi, Okta. Teman-teman KKN posko 64, Burhan, Lala, Sindiyang, Ika, Oji, Sindi, Salman, Ajeng, Undoh, Ronal , terimakasih telah memberikan doanya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga sukses selalu.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini adalah buah dari hasil pemikiran penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiara Faikha Suci', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

**Tiara Faikha Suci**

**NIM. 1705046042**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagaiberikut:

### A. Konsonan

ء= ‘	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ‘	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

### B. Vokal

اَ= a

اِ= i

اُ= u

### C. Diftong

اِي= ay

اُو= aw

### D. Syaddah(-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

### **E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصناعات = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **F. Ta' Marbutah (ة)**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيرة المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## **ABSTRAK**

*Pada awal tahun 2021 pemerintah desa Penyangkringan memberikan fasilitas berupa pasar sementara, namun berdirinya bangunan tersebut kurang efektif dari lokasinya sehingga banyak masyarakat yang tidak mau menempati dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang menyebabkan bangunan pasar sementara tersebut dibongkar. Dalam permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah seperti dalam tahap memanfaatkan hasil pembangunan desa.*

*Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linier berganda dengan program SPSS. sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive Sampling. Jumlah responden yang di jadikan sampel yaitu sebanyak 98 sampel responden masyarakat Desa Penyangkringan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi alokasi dana desa, dan kepemimpinan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.*

*Penelitian ini memperoleh hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.*

***Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kepemimpinan Pemerintah Desa***

## ABSTRACT

*In early 2021, the village government of Penyangkringan provided facilities in the form of a temporary market, but the construction of the building was less effective than its location so that many people did not want to occupy it and caused pros and cons in the community which caused the temporary market building to be demolished. In these problems, it can be seen that community participation in village development is still low as in the stage of utilizing the results of village development.*

*The purpose of this study is to examine whether there is an effect of accountability, transparency of village fund allocation, and village government leadership on community participation in village development. The object of this research is the village community of Pengangkringan, Welleri Distric, Kendal regency. This research was conducted using quantitative methods. Data collection techniques using a questionnaire. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the SPSS program, the sample used purposive sampling technique. The number of respondents who were used as samples were 98 samples of respondents from the village of Pengangkringan.*

*This study found that accountability and transparency of village fund allocations did not affect community participation in village development, while leadership had a positive and significant effect on community participation in village development.*

***Keyword: Society Participation, Village Development, Accountability, Transparency, Village Government Leadership***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal)” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan. Dan penulis telah berusaha dengan segala daya dan kemampuan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, semangat, masukan, dan perhatiannya oleh karenanya ada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE.,M.Si., Akt. CA, CPA Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, memberi masukan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tuaku tercinta, bapak Ahmad Idris dan ibu Siti Malifah, yang selalu memberikan semangat, menghibur dan yang tak pernah putus doanya untuk memohon keberhasilan penulis dalam menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini.
7. Bapak Aris Supriyanto selaku kepala Desa Penyangkringan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis



**Tiara Faikha Suci**

**NIM: 1705046042**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	8
1.5    Sistematika Penulisan .....	8
BAB II .....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1    Kerangka Teori .....	10
2.1.1    Pembangunan Dalam Wilayah Pemerintahan Desa .....	10
2.1.2    Akuntabilitas .....	14
2.1.3    Transparansi.....	19
2.1.4    Kepemimpinan .....	22
2.1.5    Partisipasi Masyarakat .....	26

2.2	Penelitian Terdahulu .....	29
2.3	Kerangka Pemikiran .....	36
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	37
BAB III.....		39
METODE PENELITIAN.....		39
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	39
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	39
3.3	Populasi dan Sampel .....	40
3.4	Variabel Penelitian .....	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6	Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	43
3.7	Teknik Analisis Data Deskriptif .....	46
3.7.1	Mengolah Hasil Kuesioner .....	46
3.7.2	Pengujian Instrumen Penelitian .....	47
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.7.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
3.7.5	Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	49
3.7.6	Uji Hipotesis (Uji t) .....	49
BAB IV.....		50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		50
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian dan Hasil Data Objek Penelitian.....	50
4.1.1	Kondisi Geografis Desa.....	50
4.1.2	Kondisi Sosial Budaya Desa Penyangkringan .....	50
4.1.3	Perekonomian di desa Penyangkringan .....	51
4.1.4	Kondisi Infrastruktur Desa .....	51
4.1.5	Hasil data subjek penelitian .....	52
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	52
4.2.1	Analisis Data Deskriptif.....	52
4.2.2	Hasil Uji Instrumen .....	53
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	57
4.2.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	60

4.2.5	Hasil Uji Koefisien Determinan .....	62
4.2.6	Hasil Uji T.....	63
4.3	Pembahasan.....	65
BAB V .....		70
PENUTUP .....		70
5.1	KESIMPULAN .....	70
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN .....	70
5.3	SARAN .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....		72
LAMPIRAN .....		76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Variabel Penelitian Dan Pengukuran .....	40
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Penyangkringan .....	47
Tabel 4.2 Responden .....	49
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas .....	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Transparansi .....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kepemimpinan .....	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat .....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinan .....	60
Tabel 4.14 Hasil Uji T .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner .....	73
Lampiran 2 Tabulasi Data .....	78
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif .....	91
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas .....	92
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas .....	96
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas .....	97
Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinieritas .....	98
Lampiran 8 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas .....	99
Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	99
Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinan .....	99
Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji t .....	100
Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian .....	103
Lampiran 13 Profil Desa .....	104
Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup .....	109
Lampiran 15 Dokumentasi .....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan komponen pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat, di Jawa Tengah jumlah desa pada tahun 2020 sejumlah 8.562 desa.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah desa di Indonesia menjadikan desa perlu menjadi perhatian khusus karena merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi masyarakat yang di dalamnya terdapat hukum yang mengaturnya, desa juga memiliki batas-batas wilayah dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menjalankan seluruh aktivitas pemerintahannya sendiri dan termasuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dapat dipahami bahwa desa diberi kepercayaan untuk menjalankan aktivitas pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan alokasi dana desa yang digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Undang-undang No.17 tahun 2003 mengatakan bahwa keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara transparan, dapat tanggung jawab, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.<sup>2</sup> Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pasalnya setiap desa akan mendapatkan dana desa dengan jumlah masing-masing desa paling rendah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus dalam APBD, yaitu berkisar 1,4 milyar per tahun tetapi besarnya jumlah tersebut tidak sama pada setiap desa sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> BPS Jateng, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/22183/jumlah-desa-dan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2016-2020.html> , diakses pada 12 September 2021

<sup>2</sup> Khaerani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Aparatur Pemerintahan Negeri Dalam Pengelola Keuangan Nagari", *Journal of Education on Social Science*, vol..3 no. 1 2019, hlm 18.

Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pengembangan pos kesehatan desa, polindes, dan posyandu. Pembangunan yang dapat mempermudah aktivitas masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan pasar. Pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, pengembangan wirausaha, dan memperluas skala ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Pembangunan desa menjadi prioritas dalam upaya mensejahterakan masyarakat, Pembangunan desa harus dilakukan secara nyata dan merata, adapun dalam pembangunan desa terdapat pokok yang diharuskan ada dalam pembangunan desa, yang pertama yaitu hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa harus serasi, dinamis, dan harus terus berlanjut serta terkordinasi dengan baik karena keduanya memiliki kewajiban bersama-sama membangun desa. Kedua, pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa yaitu pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan potensi alam, Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat, serta peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif. Ketiga, sasaran pembangunan desa. Keempat, obyek dan subyek pembangunan.<sup>4</sup>

Dalam pembangunan desa terdapat pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi. Sedangkan pembangunan non fisik atau pembangunan sosial meliputi pembangunan manusia atau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada pembangunan non fisik mengedepankan peningkatan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk dasar pembangunan fisik. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun pendidikannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> KPPN BKT, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel.html> diakses pada 12 September 2021

<sup>4</sup> Emilianus Jaa, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)" Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Volume 7, No 1, April 2019.

<sup>5</sup> BAPPEDA, "Definisi Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat", Februari 2017, dalam <https://bappeda.bulelengkab.go.id> diakses pada 7 Agustus 2021

Pada tahun 2021 menurut kementerian keuangan ada tiga fokus prioritas penggunaan dana desa, *pertama* memulihkan ekonomi indonesia sesuai kewenangan desa yang terdiri dari pembaharuan dan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai posisi yang penting, pemberian listrik desa dan pengembangan usaha yang dijalankan masyarakat agar berkembang lebih baik dalam segi ekonomi. *Kedua* program penting desa yang meliputi pencatatan desa, mengklasifikasikan potensi dan sumber daya, peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, kenaikan kualitas desa wisata, memperkuat ketahanan pangan, dan menangkal stunting, serta mengembangkan desa inklusif. *Ketiga* penyesuaian kebiasaan baru yaitu desa aman covid 19. penggunaan dana desa dalam masa pandemi covid 19 dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa.<sup>6</sup> Namun Banyaknya kasus penyelewangan dana desa di Indonesia perlu menjadi perhatian bersama, bahwa pemerintah desa harusnya memiliki akuntabilitas atau tanggungjawab terhadap kewenangannya, lebih transparan dalam alokasi dana desa, dan masyarakat juga perlu ikut andil dalam pengawasan alokasi dana desa.

Menurut *Indonesia Corruption wetch* (ICW) Selama tahun 2020 orang yang didakwa atas tindak pidana korupsi mencapai 1.298 orang, sesuai dengan data bahwa praktek korupsi terbanyak dilakukan perangkat desa dengan 330 kasus.<sup>7</sup> Untuk dana bansos sepanjang tahun 2020 terdapat 107 kasus korupsi di 21 Daerah.<sup>8</sup>

Dalam hal tersebut pemimpin pemerintahan desa dan masyarakat secara bersama mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi, dan memudahkan pelaksanaan program pembangunan desa. Kepala desa dan masyarakat perlu bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa, keduanya merupakan komponen penting dari keberhasilan pembangunan desa. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, pengelolaan dana desa menjadi pokok penting dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pembangunan desa juga terdapat 3 asas yaitu tanggungjawab, transparan, dan keikutsertaan yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

---

<sup>6</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/> diakses pada 15 Juli 2021

<sup>7</sup> Tatang Guritno, "Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp.56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun", Maret 2021, dalam <https://amp.kompas.com> diakses pada 4 Agustus 2021

<sup>8</sup> Indonesia Corruption Watch, "PPKM Darurat: Jangan Ada Babak Baru Korupsi Bansos", July 2021, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/> diakses pada 4 Agustus 2021

Pemerintah Desa perlu memiliki akuntabilitas yang merupakan bentuk keharusan seorang pemimpin, pemimpin, dan penyelenggara, atau suatu lembaga kepada pihak yang mempunyai otoritas untuk menuntut penjelasan mengenai kemampuan kerja atau aktivitas pada pelaksanaan misi dan tujuan dalam bentuk pelaporan yang sudah ditetapkan secara periodik.<sup>9</sup> Dalam pembangunan desa yang paling berpengaruh merupakan peran pemerintah desa, pemerintah desa harus memiliki tanggung jawab terkait keputusan dan hasil yang diperoleh dalam tugasnya.

Transparansi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari akuntabilitas, transparansi yaitu suatu kebebasan untuk mencari tahu berbagai informasi dari pemerintahan. Transparansi membuat seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggungjawabannya.<sup>10</sup> Transparansi dalam tingkat pemerintahan desa berupa keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat berupa informai yang luas mengenai penyelenggaraan pemerintahan termasuk tentang alokasi dana desa.

Asas ke tiga dalam pembangunan desa adalah asas partisipasi, yang mana partisipasi adalah tindakan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Masyarakat sebagai subjek bersama dengan pemerintah desa diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Menurut Isbandi dalam Emilianus Jaa (2019) partisipasi masyarakat yaitu tindakan masyarakat dalam proses menemukan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani sebuah masalah, pelaksanaan dalam mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam pemerintahan desa, rakyat memiliki wakil yang bertugas menerima, mengumpulkan, untuk kemudian dikelola, dan disampaikan kepada pemerintah desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan sebuah lembaga yang ikut menjaankan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Tugas dan fungsi lain dari BPD

---

<sup>9</sup> Muchlisin Riadi, "Akuntabilitas (pengertian, prinsip, dimensi dan jenis-jenis)" Kajian Pustaka, 9 Januari 2020, dalam <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada 23 Juni 2021

<sup>10</sup> Ricky Prayogi, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulung Wetan)", Skripsi Akuntansi: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm 3

adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam pembangunan desa seringkali terjadi banyak kendala, baik keuangan maupun konsep perencanaan pembangunan yang tidak disetujui, pembangunan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa saja, keikutsertaan masyarakat juga sangat membantu dalam mensukseskan pembangunan desa. Faktor yang dapat menjadi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yaitu tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri, pekerjaan masyarakat yang juga dapat mempengaruhi waktu luang untuk partisipasinya, usia juga menjadi faktor penting lainnya, adapun dari faktor eksternal masyarakat ada faktor berupa kepemimpinan pemerintah desanya. Pemimpin masyarakat di desa merupakan orang terdepan yang dapat mempengaruhi masyarakat, merangkul, dan menggerakkan masyarakat. Pemimpin memiliki keharusan untuk memaksimalkan tujuan bermasyarakat, yaitu dengan cara memaksimalkan partisipasi masyarakatnya, pemerintahan desa diharapkan dapat memberikan pengaruh pada masyarakat untuk bersama-sama membangun desa demi mencapai tujuan yang telah ditunjukkan untuk kepentingan bersama.<sup>11</sup>

pentingnya partisipasi masyarakat yaitu masyarakat akan terbiasa mandiri, mengungkapkan gagasannya, dan terbiasa mengutarakan pendapatnya sehingga akan terjadi keterbukaan pemerintah desa dengan adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat yang diwakili oleh BPD, Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang merasa acuh dan tidak peduli, menurut pemaparan salah satu anggota BPD Desa Penyangkringan hal ini terjadi sebagai imbas dari lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD sebagai wakil dari masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa seperti pengadaan pasar sementara yang difasilitasi oleh pihak desa tidak bisa berjalan dengan baik, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sehingga masyarakat tidak mau menempati yang menyebabkan bangunan pasar sementara tersebut dibongkar, hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang baik. masyarakat sebagai salah satu unsur pembangunan desa, kurang berkontribusi dalam memanfaatkan fasilitas tersebut dan cenderung menghambat upaya pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa.

---

<sup>11</sup> Adam Latif dkk, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan", JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol 5 No. 2, Desember 2019, hlm 145

Dari permasalahan yang terjadi tersebut peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam mensukseskan pembangunan desa, selain itu tanggung jawab pemerintah desa terhadap program-program pembangunan juga merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga ditetapkan akuntabilitas sebagai variabel pertama dalam penelitian ini. Menurut penelitian Ricky Prayogi (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang berarti bahwa akuntabilitas di desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dibuktikan dengan pengisian kuesioner oleh penduduk setempat yang memberi penilaian bahwa akuntabilitas di desa cukup baik. penelitian ini sejalan dengan penelitian Emilianus Jaa (2019) yang mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Viranda (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa belum mampu mendorong masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan desa, disamping itu banyak masyarakat yang menganggap jika pembangunan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu ikut serta di dalamnya. Penelitian Lina Naehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017) mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas belum sepenuhnya baik dikarenakan masih banyak permasalahan mengenai anggaran dan kegiatan lain yang kurang maksimal, serta kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusianya.

Variabel ke dua dalam penelitian ini yaitu transparansi, menurut penelitian yang dilakukan Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari (2018) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat bertolak belakang dengan penelitian Viranda (2021) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terlalu berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dikarenakan banyak dari masyarakat yang kurang peduli dengan hal tersebut yang seringkali disebabkan oleh faktor pendidikan dan pengalaman masyarakat itu sendiri, faktor pekerjaan juga menjadi alasan, dimana orang yang bekerja cenderung kurang memiliki waktu luang untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan desa. Penelitian lain yang dilakukan Liong Tundunaung, Johny Lumolus, dan Michael Mantiri (2018) menemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal

transparansi pemerintah desa, yaitu rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa.

Variabel ketiga yaitu kepemimpinan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmannuddin dan Sumardjo (2018) terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemimpinan terhadap tingkat partisipasi masyarakat ini karena sikap saling membantu masih dijadikan budaya oleh masyarakat setempat. Penelitian lain yang dilakukan Leheta A. Fresly Pakpahan (2016) mengemukakan adanya hubungan negatif antara kepemimpinan dengan tingkat partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Rahmannuddin dan Sumardjo (2018).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus penyelewengan dana desa merupakan korupsi dengan jumlah kasus yang paling tinggi, hal ini digambarkan sebagai akibat pemerintah desa yang tidak akuntabel dan kurangnya transparansi pemerintah desa, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa merupakan hal yang harus menjadi perhatian mengingat sangat pentingnya pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pembangunan desa. Permasalahan lain yang terjadi sesuai wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota BPD Desa Penyangkringan mengenai kasus pembongkaran pasar sementara, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu juga terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang memungkinkan memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat seperti akuntabilitas, transparansi dan kepemimpinan untuk menselaraskan tujuan pemerintah desa dengan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Alokasi Dana Desa dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian dengan materi serupa.
2. Bagi pemerintah desa, dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi agar dalam menjalankan kewenangan dan kinerjanya menjadi lebih baik.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat
4. pat berpartisipasi dalam mengawal akuntabilitas, transparansi dan kepemimpinan yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar pemerintah dan masyarakat dapat berjalan selaras untuk tujuan bersama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Alokasi Dana Desa dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” disusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

#### **1. BAB I**

Dalam Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang yang memberi gambaran mengenai permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaatnya, serta sistematika penulisan.

2. BAB II

Bab ini menjelaskan teori tentang akuntabilitas, transparansi alokasi dana desa, kepemimpinan pemerintah desa dan pembangunan desa, kemudian berisi penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data

4. BAB IV

Bab ini berisi gambaran umum Desa Penyangkrian, pengujian dan hasil analisis yang sebelumnya telah di uji menggunakan alat uji statistik, dan pembahasan

5. BAB V

Bab 5 ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pembangunan Dalam Wilayah Pemerintahan Desa

Pemerintahan menurut Ellydar Chaidir dalam Susulo dan Roesli (2019) adalah suatu struktur yang didalamnya berisi bagian-bagian dan komponen yang mempunyai keterkaitan satu sama lain, jika saah satu bagiannya tidak berfungsi maka akan memberikan pengaruh pada bagian yang lain.<sup>12</sup> Sedangkan pemerintah adalah kelompok orang yang dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya yang mempunyai kewenangan untuk memimpin, mengatur dan memerintah suatu wilayah.

Dalam Islam Sistem pemerintahannya yaitu sistem khilafah, sistem ini berbeda dari sistem pemerintahan yang lain. dalam pemerintahan Islam semua urusan di dalamnya yang berkaitan dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun akhirat semua berasal dari Allah SWT.<sup>13</sup> Kepemimpinan dalaam Islam dipimpin oleh seorang khalifah, menurut Ibn Khaldun khilafah adalah pemerintah yang bertanggungjawab untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan dasar agama disetiap urusan duniawi. Pemimpin seperti inilah dalam Islam dimana seorang pemimpin berpandangan bahwa didunia ini segala sumber hukum yang berasal dari ajaran agama akan membawa kesejahteraan dan kenikmatan hidup didunia dan di akhirat.<sup>14</sup>

Fungsi pemerintahan dalam Islam, yaitu menjunjung tinggi apa yang diperintahkan Allah SWT. pemerintah harus memberantas hal-hal yang berkaitan dengan larangan dalam Islam yang bertujuan untuk memperkuat agama Islam. Pemerintah juga harus menegakkan kebenaran dalam Islam seperti melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan, mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan

---

<sup>12</sup> Daniel Susilo dan Muhammad Roesli ,“ Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945”,Mimbar Yustitia, vol. 2 no. 1, 2018, dalam <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1385/885> , diakses pada 16 September 2021

<sup>13</sup> Hanna Widayani, “Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori ‘ashabiyyah)”, Jurnal Manthiq, Vol 3 No 2 Tahun 2018, hlm 9

<sup>14</sup> Ibid, hlm 10

ketetapan aturan dalam Islam. Dalam Islam pemimpin akan mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya dihadapan Allah, pertanggungjawaban tersebut tidak akan bisa lolos dihadapan Allah meskipun bisa saja lolos di dunia. Dalam Islam pengelolaan pemerintahan diharapkan menjadi pemerintah yang bertanggungjawab, bebas terhadap perbuatan yang melanggar hukum Islam, dan dijalankan secara baik dan kompeten, karena pemerintah memiliki tugas dan tujuan utama yaitu menegakkan syariat Islam demi mewujudkan kemakmuran umat, melaksanakan prinsip keadilan, serta dapat mengemban amanah dari masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintahan dalam Islam merupakan suatu sistem dalam kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bertindak, yang mengatur segala aspek dalam masyarakat berdasarkan hukum Islam yang dapat memberikan kenyamanan hidup baik di dunia maupun diakhirat.

Indonesia dalam sistem pemerintahannya mengacu pada apa yang telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang mengatakan bahwa negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan hukun Negara Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1997 sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia adalah desentralisasi atau otonomi daerah.<sup>16</sup>

Lembaga pemerintahan yang paling bawah berada di tingkat desa, desa juga merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Menurut Widjaja (2003) dalam Adam Latif dkk (2019) Pemerintahan Desa adalah bagian dari sebuah sistem pelaksanaan pemerintahan yang diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin wilayahnya. Kepala Desa akan bertanggung jawab bersama BPD secara bersama melihat kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat kemudian melaksanakan program-program untuk mensejahterakan masyarakat dan melaporkan pelaksanaannya pada bupati.

---

<sup>15</sup> Zuhakiki, "Tata Kelola Pemerintah dan Pemimpin dalam Perspektif Islam" Kumparan, April 2021, dalam <https://kumparan.com/>, diakses pada 8 Agustus 2021

<sup>16</sup> Suaiba, "Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan", Dinamika (jurnal ilmiah dan hukum), vol 26 no.2, Februari 2020, hlm 239

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan desa, pembangunan desa merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki kehidupan berkualitas, baik secara fisik maupun non fisik yang bertujuan mengembangkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.<sup>17</sup> Terdapat dua bentuk pembangunan desa yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang menekankan pada pembanguan suatu sarana maupun prasarana yang dapat memberikan kemudahan masyarakat seperti pembanguan jalan, jembatan, dan pasar. Sedangkan pembangunan non fisik dapat disebut juga dengan pembangunan sosial seperti pendidikan, ekonomi, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan sosial budaya. Dalam pembangunan desa diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dapat tercapai kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat desa.

Pembangunan dalam Islam tidak hanya berbicara mengenai fisik dan materi melainkan menyeluruh dan harusnya berfokus pada satu tujuan yaitu kesejahteraan umat yang dimana dalam pelaksanaannya diharuskan adanya kerjasama sesama umat, sehingga terkonsep pembangunan dalam Islam sebagai usaha setiap orang untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya, tanpa hal tersebut pembangunan tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. dari tujuan pembangunan dalam pandangan Islam diatas, akan semakin terlihat ketika mengkaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan hukum Islam terhadap pembangunan, terdapat 4 (empat) landasan konsep yaitu:

1. Tauhid

Tauhid berarti keesaan Allah dan merupakan landasan untuk mengatur hubungan Manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya.

2. Rububiyah

Rububiyah merupakan ketentuan dari Allah mengenai alam semesta dan seisinya beserta manfaat didalamnya bagi seluruh umat manusia untuk tujuan kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

---

<sup>17</sup> BPKP, "Laporan Kajian Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Permasalahan Dan Pengawasannya"2014, dalam <https://www.bpkp.go.id> diakses pada 7 Agustus 2021

### 3. Khalifah

Khalifah merupakan manusia yang diberikan amanah untuk mengemban tugas menjadi seorang pemimpin, Khalifah merupakan kelebihan dari konsep pembangunan Islam, karena dalam pembangunan Islam menempatkan manusia pada tempat tertinggi dan terhormat tetapi memiliki sifat tanggung jawab dan bijaksana.

### 4. Tazkiyah

Tazkiyah merupakan penyucian dan pengembangan. Allah memberikan tugas kepada Nabi dan Rasul untuk memperbaiki diri dan hati manusia dengan segala hubungannya dengan Allah dan tidak hanya itu hubungan baik juga harus dijalin dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam sekitarnya, dan juga dengan bangsa dan negaranya. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang tentram, damai dan dapat mencapai kesejahteraan hidup.

Empat landasan diatas memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam konsep pembangunan. Dalam Islam pembangunan didasarkan kepada ketundukan manusia terhadap segala aturan yang diberikan Allah yang telah diatur sedemikian rupa dalam Islam untuk mensejahterakan umat manusia dan disinilah tauhid berperan untuk menjadikan manusia taat terhadap aturan dan ketentuan dalam Islam. Jalannya pembangunan ditentukan oleh manusia sebagai hamba Allah dan juga sebagai pemimpin atau khalifah yang memiliki tugas dari Allah untuk mensejahterakan bumi. Tugas tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak tergantung dari jalan yang dipilih. Jalan yang dipilih sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan.

Konsep tazkiyah dalam Islam merupakan sebuah usaha untuk mengubah manusia ataupun pelaku pembangunan menuju kehidupan yang lebih baik karena tazkiyah didasari dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga konsep tazkiyah ini dapat dijadikan sesuatu untuk mendorong fokus pembangunan tidak hanya mengenai fisik dan material tetapi juga fokus pada aspek moral spiritual dari pelaku pembangunan yaitu manusianya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mela, "Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", skripsi: IAIN bengkulu, 2020, hlm 56

Dalam Al Quran surah Al Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan ini hendaknya kita saling membantu atau tolong menolong, karena tujuan dari pembangunan desa yaitu mensejahterakan masyarakat yang merupakan tujuan mulia.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik maupun non fisik dalam Islam memiliki manfaat untuk mensejahterakan umat manusia, dimana pembangunan dalam Islam telah diatur melalui Al Quran bahwa dalam pembangunan desa didalamnya ada unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan tujuan yang mulia dan juga ada empat konsep yaitu Tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah yang dari semua konsep didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk kebaikan duniawi maupun ukhrawi.

## **2.1.2 Akuntabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam pemerintahan desa, dalam asas pengelolaan keuangan desa menurut permendagri 113 Tahun 2014 yaitu, pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Menurut Arista Widiyanti (2017), akuntabilitas merupakan wujud dari sikap dan perilaku seseorang maupun organisasi yang mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya dalam rangka sampai pada tujuan yang telah menjadi persetujuan bersama. Dalam pemerintahan desa dapat dipahami secara singkat bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan desa

secara keseluruhan kegiatan yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas adalah sebuah pengetahuan dan adanya tanggungjawab atas setiap tindakan yang dikerjakan, keputusan dan kebijakan yang diambil, adapun termasuk didalamnya administrasi pemerintahan dan segala lingkup kerja pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk melaporkan.<sup>19</sup> Akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat mewujudkan desa yang maju dengan pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Adianto Asdi Sangki, dkk (2017) dalam pemerintahan akuntabilitas memiliki beberapa elemen, diantaranya yaitu adanya akses kepada masyarakat luas terhadap laporan yang telah dibuat, penjelasan harus dilakukan bersama dengan masyarakat dalam forum terbuka agar mudah dalam menyampaikan pendapat, kriti, dan saran, serta pelaku yang memiliki kepentingan diwajibkan untuk hadir dalam forum, dalam pemerintahan desa, aktor berarti perangkat desa yang mempunyai tanggungjawab untuk memegang dan menjalankan amanah dari masyarakat.

Akuntabilitas dalam prespektif Islam dapat dilihat dari prinsip akuntansi dalam Islam, yaitu *pertama*, Prinsip pertanggungjawaban (accounttability) Dalam akuntansi syariah terdapat prinsip pertanggungjawaban dimana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan, contohnya seperti tanggungjawab seorang pebisnis terhadap laporan keuangannya. Dalam pemerintahan desa prinsip tanggungjawab (Akuntabilitas) juga wajib di terapkan yaitu tanggungjawab pemerintah desa terhadap pekerjaannya dan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Dalam Al Quran di jelaskan pada QS. An-nisa ayat 58

---

<sup>19</sup> Warno, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat, Jurnal STIE Semarang, Vol 8 No. 2, 2016

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas mengatakan bahwa seseorang yang diberikan amanah harus menjalankan amanah dan kewajibannya tersebut dengan penuh tanggungjawab dan menyampaikan hasil kepada yang memberikan amanah.

Penerapan akuntabilitas dalam Islam memiliki tujuan ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan, akuntabilitas menurut hukum Islam merupakan cara atau tindakan yang harus diterapkan dalam kehidupan yang merujuk pada sistem hukum yang berjalan sesuai dengan Al Qur'an dan hadist. Akuntabilitas Islam bukan hanya berbicara mengenai tindakan duniawi yang biasanya hanya berbicara perihal keuangan, tetapi juga untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan keberkahan dijalan Allah.<sup>20</sup>

#### 2.1.2.2 Jenis-jenis akuntabilitas

Ada dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal, akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau suatu lembaga kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti contoh pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pemerintah daerah, dan seterusnya.

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Masyarakat memiliki hak untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan, Pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dapat dilakukan dengan menerima aspirasi masyarakat melibatkan masyarakat

---

<sup>20</sup> Januar Eko Prasetyo, "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas", Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 24-25

dalam setiap kegiatan. Agar tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal, akuntabilitas vertikal memiliki fokus terhadap jajaran diatasnya dan akuntabilitas horizontal berfokus pada pertanggungjawaban terhadap publik atau masyarakat luas.

#### 1.1.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas terdapat 5 (lima) dimensi yaitu:

##### 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Dalam pemerinttahan desa akuntabilitas kejujuran merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah untuk bertindak jujur dan tidak memanfaatkan jabatannya dalam melakukan suatu tindakan, akuntabilitas hukum terkait dengan tanggungjawab pemerintah untuk selalu menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

##### 2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat disebut juga akuntabilitas kinerja, dimana dalam pemerintahan desa, pemerintah dalam manajemen lembaganya diharuskan dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi, dan meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki kepentingan untuk memajukan lembaga.

##### 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merupakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap program-program yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab terhadap program tersebut, program yang sudah disepakati harus dilakukan hingga tahap pelaksanaan. Program-program tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi serta tercapainya tujuan lembaga.

##### 4. Akuntabilitas kebijakan

Dalam pemerintahan untuk mengambil tindakan biasanya dilakukan rapat untuk menentukan langkah apa yang harus dipilih, kemudian hasil dari kesepakatan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang harus dijalankan,

kebijakan tersebut harus dapat mempertimbangkan dampak masa depan, sasarannya, siapa pemangku kepentingan (stakeholders), dan mana yang akan mendapatkan dampak negatif dari kebijakan tersebut. dalam hal ini akuntabilitas kebijakan merupakan tanggungjawab pemerintah secara menyeluruh dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang publik, dan pengelolaannya dilakukan secara efektif dan efisien serta dilarang keras melakukan tindak pidana korupsi. Akuntabilitas finansial berbicara mengenai ukuran anggaran dan finansial, karena pengelolaan keuangan menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan dan akan menjadi perhatian utama publik.<sup>21</sup>

##### 1.1.1.4 Indikator keberhasilan akuntabilitas

Indikator keberhasilan akuntabilitas diantaranya:

1. Meningkatkan rasa percaya dan perasaan puas dalam diri masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Apabila masyarakat merasa percaya dan puas terhadap pengelolaan desa maka hubungan antara masyarakat dan perangkat desa akan menjadi lebih baik
2. Adanya kesadaran masyarakat mengenai hak untuk memberi penilaian, jika masyarakat sudah merasa percaya kepada perangkat desa maka dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk menilai jalannya pemerintahan di desa, mengkritik, dan mengungkapkan gagasan masyarakat sehingga pemerintah desa dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat, hal ini menjadikan masyarakat dan perangkat desa dapat berjalan selaras untuk membangun desa menjadi lebih baik.
3. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam lingkup pemerintahan desa, jika masyarakat

---

<sup>21</sup> Anwar Fauzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor", skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2020, hlm 21

4. ikut memantau jalannya pemerintahan desa memungkinkan terjadinya pengurangan kasus KKN.

### **2.1.3 Transparansi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance yaitu dalam pemerintahan hal-hal yang mengenai seluruh informasi baik mengenai perencanaan maupun pengelolaan dana diharuskan dilakukan secara jujur, dapat diakses dengan mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut memantau jalannya pemerintahan.

Menurut Meisy Egi Yalti (2020), transparansi merupakan penyampaian informasi mengenai pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dilakukan dengan jujur dan mengedepankan keterbukaan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi secara menyeluruh.<sup>22</sup>

Sepintas transparansi sama dengan akuntabilitas, namun terdapat beberapa hal yang mengungkapkan perbedaan dari keduanya yaitu transparansi menurut *United Nation Development Progran (UNDP)* transparansi merupakan suatu sistem informasi yang berkembang sehingga dalam penerapannya dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi layanan publik, sedangkan akuntabilitas merupakan prosedur pemerintah mengenai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah.<sup>23</sup>

Dalam undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi apapun mengenai pemerintahan yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Dapat dipahami bahwa setiap orang diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun dan memperoleh informasi apapun untuk mengembangkan

---

<sup>22</sup> Meisy Egi Yalti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah," skripsi: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2020, hlm 18.

<sup>23</sup> Maani, Karjuni Dt. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 2009, 8.1.

pribadinya, hal tersebut sejalan dengan transparansi atau keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik dan dapat memenuhi haknya untuk memperoleh informasi.

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2002) dalam Mahlel, dkk (2016) mengatakan bahwa Transparansi dalam prespektif Islam atau dalam Alquran menyangkut 4 (empat) hal yaitu, pertama *siddiq* yang artinya benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai yang terkandung didalamnya merupakan nilai kejujuran dan keikhlasan. Kedua *amanah*, artinya dapat dipercaya dan nilai dasarnya adalah terpercaya dan nilai yang terkandung didalamnya adalah kepercayaan, tanggungjawab, tepat waktu, dan transparan. Ketiga *fatonah*, artinya cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan, nilai yang terkandung di dalamnya adalah memiliki visi dan pemimpin yang cerdas. Keempat *tabligh*, artinya menyampaikan dan nilai dasarnya adalah komunikatif.

Transparansi sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam informasi yang akan di sampaikan oleh masyarakat Dalam Alquran dijelaskan dalam surah Al Isra ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menakar maupun menimbang jangan sekali-kali kita berbuat curang dan merugikan orang lain, hendaklah kita selalu menerapkan kejujuran dalam segala hal. Dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan hasil dari sikap kejujuran.

### 2.1.3.2 Prinsip Transparansi

Menurut HFI (Humanitarian Forum Indonesia) terdapat enam prinsip transparansi, yaitu:

1. Terdapat informasi dengan penjelasan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dijangkau
2. Detail keuangan dan rangkaian kegiatan di terbitkan secara umum
3. laporan mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek dilaporkan secara terus menerus sesuai waktu yang telah ditentukan dan dapat dilihat oleh masyarakat luas.
4. Adanya laporan tahunan, website atau media organisasi
5. Adanya pedoman saat penyebaran informasi.<sup>24</sup>

### 2.1.3.3 Indikator Transparansi

Berikut merupakan indikator transparansi:

1. Terdapat informasi yang benar dan akurat yang dapat di akses.
2. Adanya kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai langkah-langkah maupun biaya yang di butuhkan.
3. Akses informasi yang mudah dijangkau..
4. Adanya susunan tahap-tahap pengaduan apabila ada kelalaian atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan.

Informasi yang disediakan pemerintah desa diharuskan menjadi sesuatu yang mudah diakses oleh masyarakat, informasi yang dikeluarkan juga merupakan informasi terbaru dan akurat. Dengan transparansi akan mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawal jalannya pengelolaan dana desa agar mengurangi hambatan dalam pembangunan desa.

---

<sup>24</sup> Lion Tundunaung, dkk, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud", Eksektif, Vol 1 No.1 Tahun 2018

## 2.1.4 Kepemimpinan

### 2.1.4.1 Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin merupakan seseorang yang dipercaya mengemban tugas dan tanggungjawab untuk memimpin sebuah kelompok, organisasi maupun lembaga. Dan kepemimpinan merupakan sikap yang di terapkan oleh pemimpin kepada tim untuk mengatur jalannya sebuah kelompok, organisasi, maupun lembaga agar berjalan efektif dan efisien. Trisusanti Lamangida, dkk (2017) mengatakan dalam menjadi pemimpin, seseorang perlu memiliki kelebihan dibandingkan oleh orang lain dalam kelompoknya, pemimpin yang ideal juga diharuskan mampu menjadi motivator, fasilitator dan mediator bagi kelompoknya.<sup>25</sup>

Kepemimpinan menurut Andrew (2002) dalam Rahmanuddin dan Sumardjo (2018) merupakan kekuatan yang dinamis yang dapat memotivasi dan menggerakkan serta mengoordinasikan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anoraga (2003) dalam Adam Latif, dkk (2019) mengatakan kepemimpinan merupakan sebuah proses pemimpin dalam menginspirasi masyarakat untuk lebih baik dalam berpartisipasi agar dapat tercapai hasil yang diharapkan bersama, karena kepemimpinan juga merupakan dimensi utama yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.<sup>26</sup>

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah tindakan dan kegiatan untuk memimpin, mengarahkan, dan menunjukkan jalan kepada Allah SWT. Dalam Islam seorang pemimpin diharuskan mampu mengajak anggotanya untuk berjalan bersama-sama di jalan Allah. Dalam Al Quran dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 59:

---

<sup>25</sup>. Trisusanti Lamangida, dkk, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto", Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 6 No.1, Juni 2017

<sup>26</sup> Adam Latif, dkk, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan" JAKPP (Jurnal Analais Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol.5 No.2, Desember 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dasar kepemimpinan dalam Islam ada 5 (lima) yaitu fondasi tauhid, fondasi kesetaraan manusia, fondasi persatuan Islam, fondasi nasehat tentang kedaulatan rakyat, serta dasar keadilan dan kesejahteraan semua. Imam Al Mawlawi mengatakan bahwa membangun peran kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah keharusan, pemimpin dan kepemimpinannya merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai dua tujuan yaitu nilai-nilai dalam agama yang merupakan alternatif dari misi kenabian untuk melindungi agama, dan yang kedua yaitu, untuk memerintah dan menjalankan urusan dunia, artinya tujuan dari kepemimpinan adalah menciptakan rasa aman, keadilan, menegakkan *amar maruf nahi munkar*, peduli terhadap orang lain, dan mengatur serta memecahkan masalah masyarakat.<sup>27</sup>

#### 2.1.4.2 Tipe Kepemimpinan

##### 1. Kepemimpinan Otokratik

Tipe kepemimpinan otokratik merupakan pemimpin dimana pemimpin mempunyai kekuasaan yang absolut dan cenderung egois. Tipe kepemimpinan ini pemimpin lebih menekankan bahwa anggota harus mematuhi semua kebijakan pemimpin, dan pemimpin juga tidak terbantahkan.

##### 2. Kepemimpinan Paternalistik

---

<sup>27</sup> Moh Amin, "Kepemimpinan Dalam Islam", Revolusi, Vol.2 No. 2, Desember 2019

Tipe kepemimpinan ini adalah tipe kepemimpinan tradisional dimana kepemimpinan ini lebih cenderung ada di masyarakat agraris,

3. Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik ini merupakan tipe kepemimpinan yang memiliki daya tarik tersendiri

4. Kepemimpinan *Laissez Faire*

Kepemimpinan *laissez faire* merupakan kepemimpinan yang mempunyai pandangan bahwa organisasi akan berjalan baik apabila anggotanya telah dewasa.

5. Kepemimpinan demokratik

Kepemimpinan demokratik merupakan kepemimpinan yang sadar bahwa dalam mencapai tujuan yang diinginkan maka seorang pemimpin harus bekerjasama dengan anggotanya, dan menyadari bahwa setiap pemimpin maupun anggota memiliki perannya sendiri dan sama-sama berkontribusi untuk tercapainya tujuan bersama.

#### 2.1.4.3 Fungsi Kepemimpinan

Kepala desa sebagai pemimpin di pemerintahan desa diharapkan memiliki kepemimpinan yang baik, adil, dan dapat diandalkan, adapun fungsi kepemimpinan yaitu:

1. Fungsi instruktif merupakan pemimpin yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, kapan waktu untuk mengerjakan dan melaporkan hasil perintah, dan dimana pelaksanaan perintah. Pada intinya pemimpin sebagai komunikator dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

2. Fungsi konsultatif

Fungsi konsultatif merupakan salah satu cara pemimpin mengambil sebuah keputusan dalam kebijakan dimana pemimpin saling melakukan komunikasi dua arah dan saling bertukar pendapat untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih baik.

### 3. Fungsi partisipasi

Fungsi partisipasi merupakan fungsi dimana pemimpin harus mengikutsertakan bawahannya dalam semua kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil kegiatan.

### 4. Fungsi delegasi

Fungsi delegasi merupakan kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang dia percaya untuk menjalankan wewenangnya secara baik, bertanggungjawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi ini dijalankan karena biasanya seorang pemimpin tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri dan memerlukan seseorang untuk membantu. Namun fungsi ini tidak sering digunakan dalam pemerintahan desa.

### 5. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang harus dimiliki pemimpin dalam mengendalikan jalannya tugas-tugas dan kegiatan secara efektif dan terkendali, adapun dalam membuat sebuah kegiatan menjadi terkendali dan efektif maka harus ada koordinasi antara pemimpin dengan bawahannya karena setiap anggota memiliki tugas dan perannya masing-masing yang bertujuan untuk terselesaikannya tugas secara baik, efektif, dan efisien.<sup>28</sup>

#### 2.1.4.4 Indikator Pendorong Kepemimpinan Kepala Desa

Indikator pendorong kepemimpinan yang pertama yaitu sifat *leadership* merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas kelompok, pemimpin harus dapat memotivasi, mengarahkan dan menggerakkan anggotanya untuk menyelesaikan tugasnya dalam rangka untuk mencapai visi dan misinya.

Indikator yang kedua adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat bertanggungjawab. Seorang kepala desa harus dapat bertanggungjawab baik kepada atasannya maupun kepada bawahannya dan yang terpenting kepada masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada pemerintah desa sebagai pemimpinnya.

---

<sup>28</sup> Muhammad Afandi Gunawan, "Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Aparat Pada Masyarakat Di Desa Kali Baru Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 7 No. 1, April 2020

Indikator yang ketiga adalah kepercayaan dari bawahan, seorang pemimpin harus bisa mendapatkan kepercayaan dari bawahannya agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bisa bekerjasama dengan bawahan dan menciptakan kondisi yang harmonis diantara keduanya, jika hubungan keduanya tidak bisa harmonis maka akan berimbas pada kinerja aparat desa yang kurang efektif dan tidak terkondisikan, oleh sebab itu perlu bagi pemimpin untuk menjalin hubungan baik agar segala jenis pekerjaan maupun permasalahan dapat diatasi bersama-sama.

Indikator yang keempat yaitu membuka ruang diskusi, dengan membuka ruang diskusi seorang pemimpin akan bisa menyampaikan dan mendengar pendapat dari masing-masing bawahannya, mengutarakan permasalahan sehingga dapat dipikirkan dan diselesaikan secara bersama-sama, selain itu dengan membuka ruang diskusi pemimpin dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bawahannya.

## **2.1.5 Partisipasi Masyarakat**

### **2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan salah satu indikator *good governance*, partisipasi biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam sebuah kelompok. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam sebuah program yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dalam pembangunan desa berarti partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan hingga pada pelaksanaannya.

Menurut Anita Firdaus, dkk (2019) partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat dalam kegiatan maupun pembangunan, baik berupa pernyataan maupun tindakan seperti memberi masukan, tenaga, dan waktu, serta ikut merasakan manfaatnya.

Partisipasi dalam Islam bermakna bahwa dalam penciptaan manusia Allah menjadikannya dalam suatu kelompok, bersuku-suku, dan saling membutuhkan, manusia juga makhluk yang mempunyai nilai-nilai interaksi, dan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Partisipasi disebut juga

gotong royong dan tolong menolong yang dilakukan secara ikhlas dan tulus untuk meringankan beban orang lain. Dalam gotong royong dan tolong menolong dibutuhkan suatu kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi, dalam tolong menolong dan gotong-royong ini dapat membangun dan mempererat *ukhuwah Islamiyah* dan menegakkan ajaran Islam yang mengandung unsur kebaikan terhadap sesama makhluk hidup, mengajarkan untuk selalu berfikir positif dalam segala hal dan berusaha berbuat baik kepada siapapun.<sup>29</sup> Dalam Al Quran surah Ali Imron ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang dalam berinteraksi dengan sesamanya harus berlaku lemah lembut dan saling memaafkan, dan setiap orang diharapkan selalu bermusyawarah dalam urusan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hubungan sesama manusia.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam suatu kegiatan yang berupa tindakan fisik, ataupun pemikiran yang berguna

---

<sup>29</sup> Ayu Ari Sedy, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dimediasi Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau", skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm. 26

bagi tercapainya tujuan tertentu dan masyarakat juga akan merasakan manfaatnya.

#### 2.1.5.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat

1. Partisipasi uang/harta benda yaitu partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan harta benda atau uang yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan desa ataupun kerjabakti, dan lain sebagainya.
2. partisipasi tenaga yaitu memberikan sumbangan berupa tenaga atau fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Ikut serta dan berbaur dengan masyarakat yang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
3. Partisipasi keterampilan yaitu dalam suatu kegiatan menyumbangkan keahlian yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal dalam suatu program.
4. Partisipasi ide pikiran merupakan pemberian ide, pendapat yang konstruktif yang berguna untuk memperlancar pelaksanaan program.
5. Partisipasi didalam mengambil kebijakan, dalam hal ini masyarakat ikut untuk kelancaran program yang dijalankan.<sup>30</sup>

#### 2.1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang datang dari diri masyarakat sendiri, faktor ini biasanya berupa latar belakang, sifat, sikap, dan kebiasaan. Sedangkan Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri masyarakat.

Faktor internal yang mempengaruhi masyarakat meliputi kesadaran, pendidikan, dan penghasilan. partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dimana untuk ikut serta masyarakat harus mendapatkan dorongan dalam dirinya untuk melakukan tindakan, jika masyarakat sadar akan tujuan dari keikutsertaan dirinya maka faktor yang mempengaruhi partisipasinya adalah kesadaran tersebut. Pendidikan juga termasuk faktor internal yang

---

<sup>30</sup> Adam Latif, dkk, hlm 150

mempengaruhi partisipasi masyarakat, orang yang berpendidikan biasanya memiliki sikap dan pemikiran ingin ikut membantu dalam tercapainya tujuan tertentu karena biasanya masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi biasanya memiliki perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan. Faktor internal yang terakhir adalah penghasilan, seseorang yang berpenghasilan baik dan mencukupi dapat mendorong dirinya untuk berpartisipasi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi kepemimpinan dan fasilitas. Masyarakat desa merupakan orang dengan karakter yang beragam, dan pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar untuk menyatukannya sehingga masyarakat meyakini bahwa pemimpinnya merupakan seseorang yang dapat mengayomi masyarakatnya, sehingga masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi. Fasilitas juga merupakan Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dimana dalam hal ini kantor balai desa dengan segala kelengkapannya akan mendorong untuk melaksanakan tugas, untuk pengelolaan, untuk pencatatan, dan pelaporan, perangkat desa dapat memberikan contoh dengan bekerja dengan baik karena fasilitas yang dimiliki juga memadai sehingga masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi.<sup>31</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 penelitian terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ricky Prayogi (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3)

---

<sup>31</sup> Nina Dwi Hastuty, "Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)", skripsi: UIN Sultan Thaha Saifudin, 2021

		Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan)	Variabel Dependen: Partisipasi Masyarakat	berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.
2.	Jufani Arneta Viranda (2021)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin	Variabel Independen: Akuntabilitas dan Transparansi  Variabel Intervening: Partisipasi Masyarakat  Variabel Dependen: Efektivitas Program Pembangunan	Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program pembangunan desa  Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas program pembangunan  Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.  Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap

				<p>partisipasi masyarakat.</p> <p>Efektivitas pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat</p> <p>Secara tidak langsung transparansi melalui partisipasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas program pembangunan desa</p> <p>Secara tidak langsung akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektifitas program pembangunan desa</p>
3.	Yuni Widya Lestari (2021)	Pengaruh akuntabilitas,	Variabel Independen:	Tidak Terdapat pengaruh yang

		transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Pembangunan desa	Akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan Variabel Dependen: Partisipasi Masyarakat	signifikan antara akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat  Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat  Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.  Akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, sebesar 7,1%
4.	Muhammad Rahmannuddin dan Sumardjo (2018)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana	Variabel Independen: Kepemimpinan  Variabel Dependen: Partisipasi	Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat

		Desa (Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)	Masyarakat	
5.	Emilianus Jaa (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi  Variabel Dependen: Pembangunan Desa	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.
6.	Yohanes Antonius Lasa, Asih Widi Lestari (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa	Variabel Independen: Akuntabilitas dan Transparansi  Variabel Dependen: Partisipasi Masyarakat	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat.  Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

				Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo.
7.	Adam Latif, Irwan, dan Ahmad Mustanir (2019)	Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan	Variabel Independen: Kepemimpinan  Variabel Dependen: Partisipasi Masyarakat	kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat
8.	Zulfadzal (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Gampong Lampeudeu Baroh Kec. Pidie, Kab. Pidie).	Variabel Independen: Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat  Variabel Dependen: Pembangunan	Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara stimulan berpengaruh terhadap pembangunan.  Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap

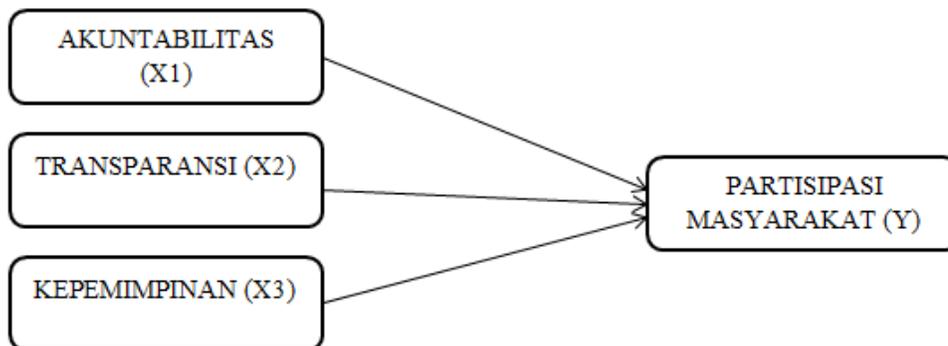
				<p>pembangunan</p> <p>Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan.</p>
9.	<p>Afida Putri Eka Kuswanti (2020)</p>	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi ADD, dan Partisipasi Masyarakat</p> <p>Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Transparansi ADD berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan</p>

				masyarakat.
10.	Marlina (2018)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sei Nahodaris, Kec. Panai, Kab. Labuhan Batu	Variabel Independen: Kepemimpinan Kepala Desa  Variabel Dependen: Partisipasi Masyarakat	Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai variabel dependen, namun juga terdapat perbedaan, diantaranya yaitu, objek penelitian yang berbeda, perbedaan penggunaan variabel independen, dan perbedaan hasil penelitian.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis secara epistemologis merupakan kata yang berasal dari Yunani, *hypo* artinya di bawah dan *thesis* artinya pendirian, pendapat atau kepastian dapat diartikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih diragukan kebenarannya sehingga perlu dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui kebenarannya. Sedangkan Pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara dari rusan masalah yang belum bisa dipastikan kebenarannya sehingga harus dilakukan pengujian, dan jika dari pengujian itu terbukti kebenarannya maka hipotesis tersebut dapat menjadi teori.<sup>32</sup>

### 2.4.1 pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya menjalankan perencanaan dan pelaksanaan, dalam hal ini pemerintah keseluruhan dari proses penganggaran mulai dari rancangan hingga pelaksanaan harus dilaporkan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil laporan tersebut kemudian dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi pemerintahan dan dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ricky Prayogi (2019) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat. Dalam hal ini berarti semakin baik akuntabilitas pemerintahan desa maka partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi karena masyarakat merasa kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah desa dijalankan dengan baik.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.**

---

<sup>32</sup> Anwar Hidayat, "Hipotesis Penelitian Adalah: Penjelasan Lengkap", <https://www.statistikian.com>, diakses pada 24 Juli 2021

#### **2.4.2 pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap partisipasi masyarakat**

Transparansi menurut Filda Gian (2020) adalah keterbukaan untuk mengakses informasi ekonomi maupun aktivitas yang ada di pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya politik. Transparansi dapat diartikan pula sebagai media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga kegiatan dalam pemerintahan dapat terpantau dan menghindari adanya praktek korupsi. Sehingga masyarakat akan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuni Widya Lestari (2021) terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap partisipasi masyarakat. Artinya ketika transparansi dilakukan secara baik dan benar atau semakin baik transparansi yang dilakukan pemerintah desa maka partisipasi masyarakat juga akan semakin baik.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.**

#### **2.4.3 pengaruh kepemimpinan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat**

Dalam pemerintahan desa kepemimpinan harus dapat dilakukan dengan baik mengingat bahwa pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat, jadi apabila kepemimpinan dijalankan dengan baik maka partisipasi masyarakat juga akan semakin meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmannuddin dan Sumardjo (2018) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan dan partisipasi masyarakat yang berarti bahwa jika kepemimpinan baik maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini digambarkan bahwa cakupan materi yang dibahas mengenai akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa dan kepemimpinan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu jenis data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diukur besar kecilnya maupun jumlahnya, bersifat lebih objektif yang berarti penilaian orang lain tidak akan berbeda. Data kuantitatif sangat bergantung pada akurasi karena dapat mempengaruhi kualitas penelitian. Pengolahan data pada kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika.<sup>33</sup>

Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan, dan hubungan antar variabel, partisipan, dan lokasi penelitian. Dimulai dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian kemudian mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur dan diamati, hingga pada akhirnya tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menghubungkan anatar variabel, seperti atas kaitannya dengan hasil penelitian survei, atau untuk membandingkan beberapa sampel atau kelompok tertentu.<sup>34</sup>

##### 3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya berupa jajak pendapat dari seseorang maupun kelompok, wawancara, maupun observasi serta

---

<sup>33</sup> Ana Widiawati, "Data Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian" , <https://penerbitbukudeepublish.com> , diakses pada 21 Juli 2021

<sup>34</sup> Jhon W.Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta,2016, hlm.171

pengujian. Data primer ini didapatkan langsung dari lapangan dan bisa juga disebut data pertama. Dalam penelitian ini data primer diambil melalui kuesioner yang akan di bagikan secara langsung kepada masyarakat desa penyangkringan.

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari media perantara seperti buku, jurnal, catatan atau arsip yang telah ada. Data skunder ini merupakan data yang telah ada sebelumnya dan biasanya digunakan untuk melengkapi data penelitian.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan jumlah seluruhnya subjek dalam penelitian yang karakteristiknya akan diteliti, subjek tersebut dapat berupa orang, institusi, dan benda. Jenis populasi dibagi menjadi tiga yaitu populasi berdasarkan jumlahnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan perbedaan lain.

Jenis populasi berdasarkan jumlahnya, jenis populasi ini dibagi menjadi dua yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas merupakan populasi yang dapat dihitung karena jumlahnya terbatas atau secara kuantitatif terbatas, sedangkan populasi tidak terbatas merupakan populasi yang tidak dapat dinyatakan bentuk dan jumlahnya karena tidak terbatas.

Jenis populasi berdasarkan sifatnya, dalam populasi jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama, dan memiliki karakteristik yang sama sehingga apabila dilihat secara kuantitatif jumlahnya tidak menjadi masalah. Sedangkan populasi heterogen yaitu populasi yang dalam unsurnya terdapat variasi sehingga terdapat batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh masyarakat Desa Penyangkringan.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Sukardi, (2012) mengatakan sampel adalah bagian dari sub-sub populasi yang diambil datanya sehingga bisa disebut subjek penelitian. Sempel diambil apabila populasi merupakan jumlah yang besar sehingga tidak memungkinkan jika

semua populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel dengan metode *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dihitung dengan rumus slovin dengan standar error 10%, Kriteria responden adalah masyarakat usia produktif dengan rentan usia 17-64 Tahun, yang dianggap mampu menilai sesuatu dengan baik dan cakap hukum, serta aktif di lingkungan masyarakat.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{6.246}{1 + 6.246 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6246}{1 + 62,46}$$

$$n = \frac{6.246}{63,46}$$

$$n = 98,42$$

Dari rumus diatas menghasilkan sampel sebanyak 98 responden.

### 3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan pokok pembahasan yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian, dalam sebuah penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran dan pusat perhatian yang akan diobeservasi dan diukur.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel bebas (*independen variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan dan mempengaruhi yaitu berefek pada outcome, atau variabel yang nilainya mempengaruhi variabel yang lain. variabel bebas dikenal dengan istilah variabel *treatment, manipulated, antecedent*, atau *predictor*

---

<sup>35</sup> Anwar Hidayat, "Penjelasan Lengkap Berbagai Jenis Variabel Penelitian", <https://www.statistikian.com>, diakses pada 22 Juli 2021

## 2. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas, variabel terikat adalah hasil dari pengaruh variabel bebas. Istilah lain dari variabel terikat adalah variabel *criterion, outcome, effect, dan response*.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa, dan variabel dependennya yaitu partisipasi masyarakat.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui:

#### a. Angket (kuesioner)

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan kepada responden. Survei ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Dalam skala Likert, setiap variabel memiliki indeks yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menyusun jenis pertanyaan berikut: Pernyataan atau pertanyaan. Saat mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima tingkat sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

Setiap poin jawaban diberi skor yang berbeda, yaitu: untuk jawaban SS diberi nilai 5, jawaban S diberi nilai 4, jawaban N diberi nilai 3, jawaban TS diberi nilai 2, dan jawaban STS diberi nilai 1.

Dalam penyusunan kuesioner hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan angket, penulisan ini menyangkut prinsip-prinsip seperti jelas, membantu ingatan responden, membuat responden bersedia untuk menjawab, menghindari bias, mudah mengutarakan, dapat menyaring responden.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berbicara berhadapan-hadapan dengan partisipan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan, dalam menggali informasi secara lisan membutuhkan pertanyaan yang secara umum bersifat terbuka supaya dapat memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.<sup>36</sup> Setelah mendapatkan informasi dari partisipan kemudian biasanya ditulis atau direkam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti dalam melakukan penelitian bisa menggunakan dokumen-dokumen sebagai referensi, dokumen ini bisa berupa dokumen publik seperti surat kabar, makalah dan dapat juga dengan dokumen privat seperti surat, email, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

### 3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran

**Tabel 3.1 Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran**

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas	akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan kewajiban pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan desa secara keseluruhan kegiatan yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan, pelaporan,	1. Bertanggungjawab terhadap kebijakan yang telah diambil dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. 2. Adanya kepatuhan terhadap prosedur yang meliputi adanya pelayanan yang	Diukur melalui angket dengan skala likert

<sup>36</sup> Jhon W.Creswell, hlm. 254

<sup>37</sup> Ibid, hlm 255

	dan pertanggungjawaban keuangan desa.	<p>responsive dan cepat.</p> <p>3. Adanya kejujuran dan hukum. Kejujuran yang meliputi berkurangnya kasus korupsi. Hukum yang meliputi kepatuhan pemerintah terhadap hukum.</p> <p>(Novatiani, R. Wedi, dan Diandra, 2019)</p>	
Transparansi	Transparansi dalam pemerintahan daerah merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Dan segala bentuk proses tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keterbukaan informasi pelaksanaan dan anggaran.</li> <li>2. Adanya kelengkapan informasi yang akurat dan benar dalam setiap aspek kegiatan.</li> <li>3. Adanya ketersediaan akses laporan keuangan, yang dapat dengan mudah dijangkau</li> <li>4. Adanya laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap pembangunan dan disertai dengan dokumentasi</li> </ol>	Diukur melalui angket dengan skala likert

		(Meisy Egi Yalti,2020)	
Kepemimpinan	kepemimpinan merupakan sikap yang di terapkan oleh pemimpin kepada tim untuk mengatur jalannya sebuah kelompok, organisasi, maupun lembaga agar berjalan efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kemampuan untuk mengambil keputusan</li> <li>2. Adanya kemampuan untuk memotivasi</li> <li>3. Adanya kemampuan komunikasi.</li> <li>4. Tanggungjawab</li> </ol> <p>(muhammad reynaldi fuad 2021)</p>	Diukur melalui angket dengan skala likert
Partisipasi Masyarakat	partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan baik berupa tindakan fisik, maupun pemikiran yang berguna bagi tercapainya tujuan tertentu dan masyarakat juga akan merasakan manfaatnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemauan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan yang meliputi pengidentifikasian masalah dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan yang meliputi kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa uang, tenaga, keahlian maupun pemikiran.</li> <li>3. Keterlibatan dalam</li> </ol>	Diukur melalui angket dengan skala likert

		<p>penerimaan dan pemanfaatan hasil yaitu kesediaan masyarakat memanfaatkan setiap hasil pembangunan</p> <p>4. Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil</p> <p>Yang meliputi penyampaian kritik dan saran dari masyarakat mengenai pembangunan.</p> <p>(Ricky prayogi 2019)</p>	
--	--	--	--

### 3.7 Teknik Analisis Data Deskriptif

Teknik analisis data adalah metode pengukuran data dalam suatu penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 21, dan analisis deskriptif biasanya berupa data sensus dalam jumlah besar atau sejenisnya. Metode analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk memperjelas dan menjelaskan lebih lanjut suatu peristiwa. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran agar data mudah dipahami

#### 3.7.1 Mengolah Hasil Kuesioner

Hasil penyebaran kuesioner akan dihitung dengan skala internal dan menggunakan metode skala likert. Sugiyono (2011) dalam Ricky Prayogi (2019) Skala likert digambarkan digunakan untuk menemukan pendapat dan persepsi individu atau orang tentang fenomena sosial.

## 3.7.2 Pengujian Instrumen Penelitian

### 3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah ketepatan instrumen dalam pengukuran, Kuesioner harus melalui pengukuran untuk menentukan valid dan tidaknya sebuah data. Uji validitas berfungsi untuk mengukur validitas kuesioner. pertanyaan dikatakan valid jika bisa mengungkapkan suatu hal yang akan di ukur, maka angket tersebut dinyatakan. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r-tabel dengan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-2$ ,  $n$  untuk jumlah sampel, dan alpha sebesar 5% atau 0,05. Jika hasil r hitung lebih besar dari r tabel, maka nilainya positif dan item atau pertanyaan tersebut dapat divalidasi.<sup>38</sup>

### 3.7.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur apakah alat uji memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan berulang-ulang. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas memakai rumus *Alpha Cronbach* karena dalam penelitian ini instrumen berupa angket dan skala bertingkat, jika nilai Alpha Semakin kecil berarti banyak pula item yang tidak reliabel, menurut Ghozali 2012 penggunaan standar nilai Alpha > 0,6 artinya reliabilitas mencukupi dan jika nilai Alpha > 0,8 maka dapat diartikan seluruh item reliabel.<sup>39</sup>

## 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

### 3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal. Jika variabel tidak berdistribusi normal, maka uji statistik akan menurun. Uji normalitas melakukan pengukuran data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai perbedaan signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data akan berdistribusi normal, jika kurang dari 5% maka menjadi 0,05, dan dapat dikatakan tidak terdistribusi normal.

---

<sup>38</sup> Ricky Prayogi, hlm 60

<sup>39</sup> Ibid, hlm 61

### 3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Jika tidak ada korelasi antara variabel independen, bisa dikatakan baik. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan nilai tolerance and variance factor (VIF) untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi.  $VIF = 1 / \text{toleransi}$ , jadi jika toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Untuk menunjukkan adanya multikolonieritas nilai cutoff yang digunakan untuk nilai tolerance  $>0,10$  dan  $VIF < 10$

### 3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk melakukan uji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan kepengamatan yang lainnya dalam sebuah model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan cara melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED, apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terdapat heteroskedastisitas adalah model penelitian yang baik.<sup>40</sup>

### 3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda tujuannya untuk menjelaskan ataupun memprediksi atau memberi arah positif maupun negatif dalam hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel yaitu variabel x dan variabel y. variabel y sebagai variabel yang dijelaskan (partisipasi masyarakat) dan variabel x sebagai variabel penjelasnya (akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan).<sup>41</sup>

Rumus yang digunakan yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

---

<sup>40</sup> Mulyono, "Analisis Uji Asumsi Klasik", 2019, dalam <https://bbs.binus.ac.id> diakses pada 2 Agustus 2021

<sup>41</sup> Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, "Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya Dengan R" edisi pertama, KENCANA, Jakarta, 2016, hlm 22, dalam <https://books.google.co.id> diakses pada 2 Agustus 2021

Y	= partisipasi masyarakat
a	= costanta
b	= koefisien regresi
X <sub>1</sub>	= akuntabilitas
X <sub>2</sub>	= transparansi
X <sub>3</sub>	= kepemimpinan
e	= erorr <sup>42</sup>

### 3.7.5 Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinan merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diperlukan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 hingga 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 artinya bahwa variabel bebas menyediakan hampir segala informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel bebas.<sup>43</sup>

### 3.7.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji T adalah pengujian untuk menjelaskan tinggi rendahnya pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Tujuan uji t adalah untuk mengetahui sumbangan setiap variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.<sup>44</sup>

Dasar ketentuan dalam uji t:

1. apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05, atau t hitung lebih besar dari t tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
2. apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, atau t hitung lebih kecil dari t tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

---

<sup>42</sup> Nikolaus Duli, Metode Penelitian Kuantitatif (beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS), Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019, hlm 162.

<sup>43</sup> Rickt Prayogi, hlm 63

<sup>44</sup> Rizky Amalia Sugista, " Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pengembangan Desa" skripsi: Universitas Lampung, 2017, hlm 45

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Hasil Data Objek Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografis Desa

Desa Penyangkringan adalah desa yang berada di wilayah Kec. Weleri Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah, Desa Penyangkringan berdiri sejak tahun 1945, berdasarkan kondisi wilayah desa Penyangkringan tepat di sebelah selatan kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, luas wilayah kurang lebih 177,850 KM<sup>2</sup>, batas desa sebelah utara berbatasan dengan desa Karangdowo dan desa Nawangsari, sisi barat berdampingan dengan desa Penaruban, selatan berdampingan dengan desa Sidomukti, timur berdampingan dengan desa Bumiayu. Secara Administrasi pemerintahan, Desa Penyangkringan dibagi dalam beberapa dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Penyangkringan**

No.	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Sekepel	3	14
2.	Kendayaan	4	14
3.	Krajan	5	16
4.	Kedonsari	5	14
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>58</b>

##### 4.1.2 Kondisi Sosial Budaya Desa Penyangkringan

Pembangunan Desa meliputi Pembangunan Infrastruktur Desa dan SDM masyarakat Desa, kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang diprioritaskan untuk tujuan perkembangan suatu wilayah. Kualitas SDM bisa dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dan kesehatannya. Pendidikan dan kesehatan merupakan kondisi yang masuk dalam prioritas pembangunan desa.

#### **4.1.3 Perekonomian di desa Penyangkringan**

Perekonomian di desa penyangkringan ditopang dengan berbagai jenis mata pencaharian diantaranya yang paling banyak adalah bermatapencaharian sebagai pedagang, yaitu pada tahun 2020 sejumlah 1431 pedagang, ke dua yaitu wirausaha sejumlah 904, dan karyawan swasta sejumlah 536.

#### **4.1.4 Kondisi Infrastruktur Desa**

Pembangunan desa secara fisik atau bisa disebut infrastruktur Desa Penyangkringan digunakan untuk mempermudah masyarakat mengakses sarana dan prasarana untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam beraktivitas, sarana dan prasarana tersebut berada di wilayah desa Penyangkringan meliputi sarana prasarana di bidang pemerintahan, kesehatan, keagamaan, pendidikan, dan sarana umum

a. Sarana dan prasarana di bidang pemerintahan

Desa Penyangkringan memiliki 58 RT yang dikepalai oleh ketua RT dan 17 RW yang dikepalai oleh Ketua RW. kondisi tersebut sudah cukup baik dan dapat memberi layanan pada masyarakat dengan baik dan juga sesuai aturan yang berlaku.

b. Sarana dan prasarana di bidang kesehatan

Dalam bidang kesehatan Desa penyangkringan memiliki sarana dan prasarana seperti puskesmas, apotik, dokter umum, bidan desa, dan posyandu.

c. Sarana dan prasarana pendidikan

Tempat pendidikan di wilayah Desa Penyangkringan berupa gedung sekolah PAUD hingga jenjang SMA yang tersebar di wilayah Desa Penyangkringan.

d. Sarana dan prasarana keagamaan

Tempat pendidikan keagamaan di Desa Penyangkringan meliputi masjid dan mushola, dengan masjid sebanyak 5 unit dalam kondisi baik dan mushola sejumlah 22 unit dan dalam kondisi baik.

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana prasarana umum Desa berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa, dengan adanya Dana Desa dari tahun 2018- 2020 maka Pemerintah Desa

Penyangkringan membangun beberapa prasarana dan sarana Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi.

#### 4.1.5 Hasil data subjek penelitian

**Tabel 4.2 Tabel Responden**

No.	Subjek Penelitian	Jumlah Responden
1.	Anggota Karang Taruna	25
2.	Ketua RW	1
3.	Ketua RT	3
4.	Kader Desa	1
5.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	1
6.	Takmir Masjid	10
7.	Pengurus PKK	29
8.	Pengurus Ormas	4
9.	Organisasi Remaja Dusun (KARESA)	24
Jumlah		98

## 4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Data Deskriptif

Penulis dalam melakukan penelitian kuantitatif ini di Desa Penyangkringan memperoleh sampel responden yang berjumlah 98. Peneliti menyebarkan 98 kuesioner dan kembali 98 kuesioner dari total 98 responden yang telah memenuhi kriteria sebagai responden.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	98	11	19	30	2518	25.69	2.797
Transparansi	98	14	21	35	2839	28.97	3.773
Kepemimpinan	98	17	23	40	3244	33.10	3.988
Partisipasi	98	16	24	40	3213	32.79	3.764
Valid N (listwise)	98						

Dari hasil pengujian deskriptif diatas dengan menggunakan SPSS 21 memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas memiliki skor minimum 19 dan skor maksimum 30, skor rata-rata jawaban responden 25,69 dengan standar deviasi 2,797 dapat dikategorikan rata-rata penilaian responden sedang.
- b. Transparansi memiliki skor minimum 21 dan skor maksimum 35, skor rata-rata 28,97 dengan standar deviasi 3,773
- c. Kepemimpinan memiliki skor minimum 23 dan skor maksimum 40, skor rata-rata 33,10 dengan standar deviasi 3,988
- d. Partisipasi memiliki skor minimum 24 dan skor maksimum 40, skor rata-rata 32,79 dengan standar deviasi 3,764

#### **4.2.2 Hasil Uji Instrumen**

##### **4.2.2.1 Hasil Uji Validitas**

Dalam uji validitas y dilakukan dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel dengan degree of freedom (df)= n-2, n banyaknya sampel dan alpha sebesar 5% atau 0.05. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka butir soal dinyatakan valid, dan jika r hitung kurang dari r tabel maka dinyatakan tidak valid. Tabel-tabel di bawah ini adalah uji validitas yang datanya didapatkan dari angket dan sudah di hitung menggunakan SPSS 21 sebagai berikut:

**a. Hasil uji validitas X1 Akuntabilitas**

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas X1 Akuntabilitas**

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,579	0,167	Valid
2	0,636	0,167	Valid
3	0,746	0,167	Valid
4	0,806	0,167	Valid
5	0,698	0,167	Valid
6	0,762	0,167	Valid

Dari hasil data yang diperoleh diatas dengan memakai rumus degree of freedom (df)= n-2, dengan Alpha sebesar 5%, atau 0,05 menghasilkan r tabel dengan nilai 0,167. Hasil r hitung pada tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan dari  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yang berarti bahwa seluruh butir pertanyaan dalam X1 akuntabilitas dinyatakan valid.

**b. Hasil uji validitas X2 Transparansi**

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas X2 Transparansi**

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,653	0,617	Valid
2	0,691	0,617	Valid
3	0,695	0,617	Valid
4	0,793	0,617	Valid
5	0,776	0,617	Valid
6	0,716	0,617	Valid

7	0,513	0,617	Valid
---	-------	-------	-------

Dari hasil data yang diperoleh SPSS 21 dengan memakai rumus degree of freedom (df)= n-2, dengan Alpha sebesar 5%, atau 0,05 memperoleh hasil r tabel dengan nilai 0,167. Hasil r hitung pada tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan dari hasil r hitung > r tabel yang berarti bahwa seluruh butir pertanyaan dalam X2 Transparansi yang berjumlah 7 butir dinyatakan valid.

**c. Hasil uji validitas X3 Kepemimpinan**

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas X3 Kepemimpinan**

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,638	0,617	Valid
2	0,581	0,617	Valid
3	0,730	0,617	Valid
4	0,774	0,617	Valid
5	0,677	0,617	Valid
6	0,698	0,617	Valid
7	0,721	0,617	Valid
8	0,752	0,617	Valid

Dari hasil data yang diperoleh dari hasil olah data SPSS 21 dengan memakai rumus degree of freedom (df)= n-2, dengan Alpha sebesar 5%, atau 0,05 mendapatkan r tabel dengan nilai 0,167. Hasil r hitung pada tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan dari hasil  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yang berarti bahwa seluruh butir pertanyaan dalam X3 Kepemimpinan yang berjumlah 8 butir dinyatakan valid.

#### d. Hasil uji validitas Y Partisipasi

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Y Partisipasi**

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,557	0,617	Valid
2	0,647	0,617	Valid
3	0,735	0,617	Valid
4	0,712	0,617	Valid
5	0,710	0,617	Valid
6	0,668	0,617	Valid
7	0,752	0,617	Valid
8	0,672	0,617	Valid

Hasil data yang diperoleh dari hasil olah data SPSS 21 dengan menerapkan rumus degree of freedom ( $df = n - 2$ ), dengan Alpha sebesar 5%, atau 0,05 memperoleh r tabel dengan nilai 0,167. Hasil r hitung pada tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan dari hasil r hitung > r tabel yang berarti bahwa seluruh butir pertanyaan dalam X2 Transparansi yang berjumlah delapan butir dinyatakan valid.

#### 4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan memakai rumus *Alpha Cronbach*, Semakin kecil nilai Alpha berarti banyaknya item yang tidak reliabel juga banyak, menggunakan standar nilai Alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi dan jika nilai Alpha > 0,8 maka dapat diartikan seluruh item reliabel, dalam penelitian ini uji reliabilitas diolah memakai SPSS 21 dan memperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,800	Reliabel
Transparansi	0,821	Reliabel
Kepemimpinan	0,845	Reliabel
Partisipasi	0,833	Reliabel

Dari hasil uji statistik dalam tabel diatas dijabarkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,800 artinya bahwa lebih besar dari 0,7 sehingga dinyatakan reliabel, pada variabel transparansi (X2) nilai Cronbach Alpha sebesar 0,821 artinya lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliabel, untuk variabel kepemimpinan (X3) dan variabel partisipasi (Y) juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 yang berarti semua variabel dapat dinyatakan reliabel.

### **4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

#### **4.2.3.1 Uji Normalitas**

Dalam uji normalitas pengukuran data bisa di buat menggunakan uji one sampel kolmogorov smirnov dengan ketentuan jika nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 artinya data mempunyai distribusi normal dan jika di bawah 5% atau 0,05 artinya distribusi tidak normal, dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan memakai SPSS 21 dan memperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas**

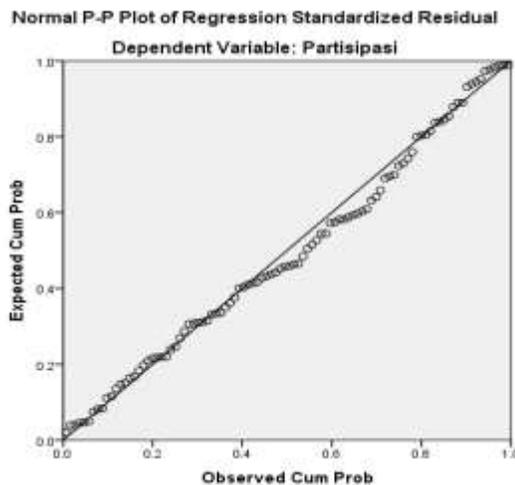
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.45280214
	Absolute Most Extreme Differences	.073
	Positive	.073
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.723
Asymp. Sig. (2-tailed)		.672

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sesuai tabel tersebut dapat dijabarkan jika uji normalitas memperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,672 yang artinya lebih tinggi dari 0,05 jadi bisa dikatakan jika data pada penelitian ini terdistribusi normal. Uji normalitas juga dinyatakan dengan bentuk grafik sebagai berikut:



Dalam grafik tersebut data yang terdistribusi normal dapat dilihat jika probability plot terlihat bahwa data penyebarannya berada sejalan dengan garis diagonalnya

#### 4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mencari tahu apakah ada korelasi antar variabel independen. Seharusnya dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya menemukan terdapat atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi maka dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi dikarenakan  $VIF = 1/Tolerance$ . Untuk menunjukkan ada tidaknya multikolinieritas nilai cut off yang dipakai untuk nilai tolerance lebih dari 0,10 dan  $VIF < 10$ . Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.339	3.650		5.025	.000	
	Akuntabilitas	.091	.163	.067	.555	.580	.610
	Transparansi	.134	.115	.134	1.165	.247	.673
	Kepemimpinan	.249	.116	.264	2.137	.035	.588

a. Dependent Variable: Partisipasi

Dari tabel diatas dapat jabarkan bahwa nilai tolerance pada akuntabilitas sebesar 0,610, transparansi sebesar 0,673, dan kepemimpinan sebesar 0,58 dan dimana semua nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Untuk nilai VIF akuntabilitas memperoleh nilai 1,639, transparansi memperoleh nilai 1,486, dan kepemimpinan

memperoleh nilai sebesar 1,701. Ketentuan nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

#### 4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang tujuannya untuk melakukan uji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan kepengamatan yang lainnya dalam sebuah model regresi. Penelitian dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Pada penelitian ini pengujian heterokedastisitas diolah dengan memakai bantuan SPSS 21 dan menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.800	2.196		2.641	.010
1 Akuntabilitas	.067	.098	.088	.684	.496
Transparansi	-.024	.069	-.042	-.342	.733
Kepemimpinan	-.125	.070	-.234	-1.782	.078

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Untuk uji heterokedastisitas ini memakai metode glejser dengan melihat nilai signifikan lebih dari 0,05 dapat dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa tingkat signifikansi akuntabilitas 0,496, transparansi 0,733 dan kepemimpinan 0,073 masing-masing nilai tersebut lebih tinggi dari 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda uji analisis linier berganda merupakan uji yang bertujuan untuk mencari tahu dan memperkirakan arah pengaruhnya apakah variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat(Y). pengujian pada penelitian ini memakai bantuan SPSS 21 dan menghasilkan data dibawah ini:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.339	3.650		5.025	.000
1 Akuntabilitas (X1)	.091	.163	.067	.555	.580
Transparansi (X2)	.134	.115	.134	1.165	.247
Kepemimpinan (X3)	.249	.116	.264	2.137	.035

a. Dependent Variable: Partisipasi (Y)

Dari tabel diatas dapat dijabarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = partisipasi masyarakat

a = costanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>

X<sub>1</sub> = akuntabilitas

X<sub>2</sub> = transparansi

X<sub>3</sub> = kepemimpinan

e = erorr

maka  $Y = 18.339 + 0,91X_1 + 0,134X_2 + 0,249X_3 + e$

a) Costanta (a)

Dapat dijabarkan jika variabel independen (X) mempunyai nilai (0), maka variabel terikatnya (Y) sebesar 18,339, sehingga dapat diartikan ketika akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan mempunyai nilai (0) maka nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebesar 18,339 yang berarti skor partisipasi masyarakat akan positif.

b) Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nilai akuntabilitas (X<sub>1</sub>) = 0,91, dapat diartikan apabila variabel akuntabilitas ditingkatkan pada hal-hal seperti tanggungjawab pemerintah desa Penyangkringan terkait perencanaan pembangunan, bertanggungjawab

- terhadap kebijakan yang telah diambil, bertanggungjawab dan responsiv terhadap keluhan masyarakat, melakukan setiap tugas yang diamanatkan dengan baik serta disertai dengan kejujuran dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan pelaporan anggaran dalam setiap kegiatan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan bertambah sebesar 9,1%.
- c) Transparansi ( $X_2$ ) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembanngunan desa. Nilai transparansi ( $X_2$ ) = 0,134, dapat diartikan apabila variabel transparansi ditingkatkan dalam hal-hal terkait dengan keterbukaan pemerintah desa terhadap laporan alokasi dana desa, kelengkapan laporan dalam setiap kegiatan dan program-program, dan kemudahan akses bagi siapa saja yang membutuhkan data, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan bertambah sebesar 13,4%.
- d) Kepemimpinan ( $X_3$ ) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nilai kepemimpinan ( $X_3$ ) = 0,249, dapat diartikan apabila variabel kepemimpinan lebih ditingkatkan lagi seperti dalam hal yang berupa kemampuan pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang dapat mensejahterakan masyarakat, pemerintah juga meningkatkan kemampuan memotivasi masyarakat, dan peningkatan komunikasi yang baik kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan bertambah sebesar 24,9%.

#### **4.2.5 Hasil Uji Koefisien Determinan**

Uji Determinasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan mengukur besarnya pengaruh variabel bebas, Akuntabilitas ( $X_1$ ), Transparansi ( $X_2$ ), dan Kepemimpinan Pemerintah Desa ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat Partisipasi Masyarakat ( $Y$ ). Dalam penelitian ini uji koefisien dibantu dengan SPSS 21 dan menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinan**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.398 <sup>a</sup>	.159	.132	3.50747

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan (X3), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Dari hasil uji koefisien determinan dalam tabel di atas nilai R 0,398 menunjukkan bahwa adanya tingkat hubungan yang rendah antara variabel independen dan variabel dependen, nilai R square 0,159, artinya besar kontribusi variabel bebas dan variabel terikat hanya sebesar 15,9%, nilai dari Adjusted R Square 0,132 atau 13,2%, artinya besaran pengaruh variabel independen yaitu Akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan terhadap variabel dependen partisipasi masyarakat hanya sebesar 13,2% .

**4.2.6 Hasil Uji T**

Uji T merupakan uji untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar ketentuan dalam uji T:

- apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05, atau t hitung lebih besar dari t tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, atau t hitung lebih kecil dari t tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

pengujian ini di uji memakai bantuan SPSS 21 dan menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.339	3.650		5.025	.000
	Akuntabilitas (X1)	.091	.163	.067	.555	.580

Transparansi (X2)	.134	.115	.134	1.165	.247
Kepemimpinan (X3)	.249	.116	.264	2.137	.035

a. Dependent Variable: Partisipasi (Y)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa diperoleh t tabel sebesar 1,665 menggunakan rumus  $Df = n - k - 1$

$$= 98 - 3 - 1$$

$$= 94$$

Dari perolehan hasil olah data memakai SPSS 21 pada tabel diatas

- 1) Akuntabilitas ( $X_1$ ) memperoleh nilai t hitung 0,555 dimana nilai tersebut lebih Rendah dari 1,665 , nilai signifikansi 0,580 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan. jika Akuntabilitas ( $X_1$ ) berpengaruh tidak signifikan terhadap partisipasi (Y) artinya bahwa hypotesis 1 (H1) ditolak.
- 2) Transparansi (X2) memperoleh nilai t hitung 1,165 dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari t tabel yaitu 1,665 , dengan nilai signifikasi 0,247 yang berarti bahwa lebih besar dari 0,05 , maka dapat di artikan bahwa transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh tidak signifikan terhadap partisipasi (Y). artinya bahwa hypotesis 2 (H2) ditolak.
- 3) Kepemimpinan (X3) memperoleh nilai t hitung 2,137 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1,665 , nilai signifikansi 0,035 yang berarti lebih rendah dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan( $X_3$ ) dengan partisipasi (Y). jika kepemimpinan( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi (Y) artinya bahwa hypotesis 3 (H3) diterima dan terbukti jika kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### 4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk uji validitas keseluruhan butir soal dinyatakan valid karena  $r$  hitung lebih tinggi dari  $r$  tabel dan tingkat signifikansi diatas 0,05. Dalam uji reliabilitas juga keseluruhan variabel pada penelitian dikatakan reliabel dikarenakan hasil nilai Cronbach Alpha 0,8 yang berarti melebihi standar 0,7. Dalam penelitian ini data terdistribusi normal, serta tidak ada gejala multikolinieritas karna nilai yang diperoleh dari masing-masing variabel lebih dari 0,10. Selain itu dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. dan heterokedastisitas. Untuk pembahasan uji hipotesis mengenai setiap variabel sebagai berikut:

**a) Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus pada Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal ).**

Menurut Adianto Asdi Sangki, dkk (2017) akuntabilitas berarti tanggungjawab pemerintah terhadap program dan kebijakan yang telah diambil kepada masyarakat. Pemerintah desa dipercaya untuk dapat memegang amanah yang diberikan masyarakat, dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan seperti dengan menyediakan akses kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan kritik saran, pengawasan dan sebagainya sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang pertama dalam penelitian ini mengatakan jika akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang artinya bahwa  $H_1$  ditolak. Hal ini dilihat dari hasil uji  $t$  dengan nilai signifikansi 0,580 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosiana Dewi (2020) dan Yuni Widya Lestari (2021) yang mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa belum mampu mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama membangun desa, program-program dari pemerintah desa juga harus

bisa bersifat adil bagi semua masyarakat desa, disamping itu banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pihak desa, hingga masyarakat merasa bahwa kehadirannya tidak begitu penting di dalamnya.

Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi sebuah konsep yang harus terus diperhatikan. Menurut Lasa dan Lestari (2018) sikap pertanggungjawaban dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam upaya menghindari penyalahgunaan pelaksanaan kebijakan keuangan desa dengan cara terlibatnya masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

akuntabilitas diharapkan dapat menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun pada kenyataannya dalam penelitian ini akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, artinya akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah Desa Penyangkringan belum mampu mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama membangun desa. Menurut Lokita (2011) faktor eksternal yang dapat menjadi pendorong partisipasi masyarakat adalah adanya akses yang diberikan pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian Lokita, slamet (2003) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada proses pembangunan dapat terwujud secara nyata apabila ada faktor yang mendukungnya, dimana salah satu faktor yang mendukungnya adalah kesempatan (*Aksesibilitas*). Artinya bahwa pemerintah desa harus memberikan akses kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembanguan desa, baik dengan ikut menyampaikan pendapat, kiritik dan saran, ataupun dalam bentuk sumbangsih berupa tenaga.

Dalam pembangunan desa masyarakat harus terlibat dari tahap perencanaanyaitu dengan memberikan masukan, saran dan selalu mengikuti musyawarah yang diselenggarakan pihak desa sampai tahap evaluasi hasil, serta tahap menikmati hasil dengan cara merawat fasilitas yang ada dengan baik, karena pembangunan tersebut ditujukan untuk masyarakat sendiri demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**b) Transparansi (X2) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus pada Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal ).**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ke dua menyatakan jika transparansi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang artinya bahwa H2 ditolak. Pendapat ini dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi 0,247 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Viranda (2021) yang mengungkapkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dikarenakan banyak dari masyarakat yang kurang peduli dengan hal tersebut yang seringkali disebabkan oleh faktor pendidikan dan pengalaman masyarakat itu sendiri, faktor pekerjaan juga menjadi alasan, dimana orang yang bekerja cenderung kurang memiliki waktu luang untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tundunaung, Lumolus, dan Mantiri (2018) mengatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam transparansi pemerintah desa, yaitu pada perencanaan pembangunan desa dimana seringkali hasil tersebut bukan berasal dari aspirasi masyarakat karena kurangnya transparansi berupa informasi dari pemerintah desa.

Transparansi merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan sebuah lembaga, lembaga yang baik sangat menjunjung sikap keterbukaan bagi siapapun yang membutuhkan informasi. Dalam penelitian ini transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang artinya transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Penyangkringan belum mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah desa Penyangkringan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu dengan meningkatkan transparansi berupa informasi mengenai desa. Di era yang serba memanfaatkan kecanggihan teknologi, generasi muda saat ini lebih memanfaatkan adanya teknologi yang memudahkan akses

terhadap sesuatu. banyak media yang dapat berguna untuk memberikan pelayanan informasi seputar pembangunan desa, salah satu media yang dapat di manfaatkan untuk memudahkan melakukan transparansi yaitu website desa. Website desa ini dapat berfungsi sebagai media informasi pembangunan desa, penyampaian kebijakan pemerintah, penyampaian alokasi dana desa serta dapat menjadi media interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Penelitian Hana Citra (2021) mengatakan bahwa fungsi website sebagai media informasi desa dalam memuat transparansi masih kurang dimanfaatkan oleh pemerintah desa, padahal website merupakan media yang paling mudah di akses oleh masyarakat.

Desa penyangkringan Kec. Weleri Kab. Kendal sendiri memiliki sebuah website desa ([penyangkringan.desa.id](http://penyangkringan.desa.id)) namun pemanfaatannya masih kurang, yang artinya bahwa pemerintah desa masih perlu melakukan pembenahan terkait transparansi mengenai kelengkapan informasi baik informasi mengenai kebijakan maupun mengenai keuangan yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat melalui website desa, hal ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan transparansi sebagai kunci terwujudnya *good governance*. Selain kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa, menurut Eddy Sukharwadi (2020) karakteristik individu juga memiliki pengaruh yang positif terhadap partisipasi masyarakat, artinya diperlukan adanya faktor dari dalam diri masyarakat seperti faktor usia, keterampilan, pengalaman pendidikan, dll yang bisa mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

**c) Kepemimpinan (X3) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus pada Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal ).**

Hasil pengujian hipotesis yang ke tiga menyatakan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang artinya bahwa H3 diterima. Pendapat ini dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi 0,035 yang artinya lebih rendah dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Slamet (2002) dalam Sahadi dkk (2020) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan, proses, dan fungsi yang umumnya digunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang agar melakukan sesuatu yang dapat memberikan pengaruh dalam rangka mencapai tujuan bersama. Artinya pemerintah desa dapat mempengaruhi masyarakat agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa adalah dengan cara menerapkan kepemimpinan yang baik.

Karakter pemimpin ideal menurut saahadi dkk (2020) setidaknya pemimpin yang baik memiliki 8 karakter yaitu cerdas, bertanggungjawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten dan tegas, adil, dan lugas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Latif, Irwan, dan Mustanir (2019) penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat, artinya semakin baik kepemimpinan pemerintah desa maka membuat tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi juga karena ketika pemerintah desa baik, mengayomi masyarakatnya, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memberikan motivasi maka masyarakat akan tumbuh rasa percaya dan tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Sesuai hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi Alokasi dana desa, dan kepemimpinan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,555 dan signifikansi 0,580 yang berarti bahwa lebih dari 0,05 dan dapat dikatakan tidak signifikan, artinya bahwa akuntabilitas di desa Penyangkringan belum mampu memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dilihat dari nilai t sebesar 1,165 dengan tingkat signifikansi 0,247 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Artinya bahwa transparansi yang dilakukan pemerintah desa masih rendah sehingga belum bisa memberikan pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, ditunjukkan dari nilai t sebesar 2,137 dengan signifikansi sebesar 0,035 yang berarti lebih rendah dari 0,05 sehingga dikatakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Artinya kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

#### **5.2 KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian peneliti masih belum dapat dikatakan sempurna sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini memiliki objek yang terbatas yaitu hanya mengenai akuntabilitas, transparansi alokasi dana desa, dan kepemimpinan pemerintah desa saja, dan dalam perhitungan data statistik menggunakan SPSS 21 memperoleh hasil bahwa variabel dalam penelitian ini hanya menghasilkan nilai R Square sebesar 15,9% dan nilai tersebut masih sangat rendah.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kemungkinan terjadinya bias, dan bisa saja terjadi kesalahan dalam pengisian ataupun tidak benar-benar diisi oleh responden itu sendiri.

### **5.3 SARAN**

Sesuai dengan kesimpulan dan adanya keterbatasan penelitian yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel atau meneliti variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dikarenakan dalam penelitian ini variabel yang ada yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam pengisian kuesioner juga diusahakan peneliti dapat mendampingi pengisian kuesioner agar responden dapat memberikan informasi yang tepat.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih memberikan akses kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan desa, pemerintah desa juga harus dapat mengutamakan tanggungjawabnya dalam program-program desa, serta diharapkan dapat lebih transparan dengan memanfaatkan media yang ada seperti website desa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat menyadari bahwa sangat penting untuk masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena masyarakat merupakan salah satu unsur agar suatu desa dapat berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Moh (2019), “Kepemimpinan Dalam Islam”, *Revolusi, Vol.2 No. 2*
- BAPPEDA.(2017), “Definisi Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat”, Februari 2017, dalam <https://bappeda.bulelengkab.go.id>
- Bastian, Indra (2015) “ Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa”, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 79
- BPKP, (2014) “Laporan Kajian Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Permasalahan Dan Pengawasannya” dalam <https://www.bpkp.go.id>
- BPS JATENG. (2021), “Jumlah Desa Dan Kelurahan Menurut Kabupaten Kota Di Jawa Tengah 2016-2020”, dalam <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/22183/jumlah-desadan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2016-2020.html>
- Creswell (2016), *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta,2016, hlm.171
- Duli, Nikolaus, *Metode Penelitian Kuantitatif (beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2019, hlm 162
- Fauzi, Anwar (2020) “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor”, skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, hlm 21
- Gunawan, Muhammad Afandi, (2020) “Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Aparat Pada Masyarakat Di Desa Kali Baru Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 7 No. 1*,
- Guritno, T, (2021) ”Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp.56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun”,dalam <https://amp.kompas.com>
- Hastuty, Nina Dwi (2021) “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)”, skripsi: UIN Sultan Thaha Saifudin, 2021
- Hidayat, Anwar (2017) “Hipotesis Penelitian Adalah: Penjelasan Lengkap”, dalam <https://www.statistikian.com> ,

- Indonesia Corruption Watch, (2021) “PPKM Darurat: Jangan Ada Babak Baru Korupsi Bansos”, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/>
- Jaa, Emilianus (2019), “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Volume 7, No 1*, hlm 3
- Kementrian Keuangan (2021), “ini prioritas penggunaan dan desa 2021”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/>, diakses pada 15 Juli 2021
- Khaerani, ”Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Aparatur Pemerintahan Negeri Dalam Pengelolaa Keuangan Nagari”, *Journal of Education on Social Science, vol..3 no. 1 2019*, hlm 18,
- KPPN BKT. (2021), “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya”, dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel.html>,
- Kurniawan, Robert dan Budi Yuniarto, “*Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya Dengan R*” edisi pertama, KENCANA, Jakarta, 2016, hlm 22
- Lamangida, Trisusanti, dkk, (2017)“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”, *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 6 No.1*
- Latif, A, dkk,(2019) “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan”, *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol 5 No. 2*, hlm 145
- Latif, Adam, dkk, (2019) “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan” *JAKPP (Jurnal Analiais Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol.5 No.2*
- Maani, Karjuni Dt (2009). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi, vol 8. no1.*

- Mela, (2020), “Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, skripsi: IAIN bengkulu, hlm 56
- Misra Fauzan , Mayar Afriyenty,(2014) “Kepemimpinan Dalam Akuntansi: Pengintegrasian Topik Dan Pengalaman Kepemimpinan Ke Dalam Kurikulum Akuntansi”, jurnal WRA, vol. 2 no. 2
- Mulyono, “Analisis Uji Asumsi Klasik”, 2019, dalam <https://bbs.binus.ac.id> diakses pada 2 Agustus 2021
- Prasetio, Januar Eko (2017), “Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas”, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Vol1, No 1*, hlm. 24-25
- Prayogi, Ricky (2019) “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan)” Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2019
- Riadi, Muchlisin (2020), ”Akuntabilitas (pengertian, prinsip,dimensi dan jenis-jenis)”, dalam <https://www.kajianpustaka.com>
- Riadi, muchlisin (2020),”Akuntabilitas (pengertian, prinsip,dimensi dan jenis-jenis)”, dalam <https://www.kajianpustaka.com>
- Sendy, Ayu Ari (2020) “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dimediasi Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”, skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 26
- Suaiba, (2020), “Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan”, *Dinamika (jurnal ilmiah dan hukum)*, vol 26 no.2, hlm 239
- Sugista, Rizky Amalia (2017) “ *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pengembangan Desa*” skripsi: Universitas Lampung, hlm 45
- Susilo, Daniel, Muhammad Roesli ,“ Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945”, *MimbarYustitia*,vol.2no.1,2018
- Tundunaung, Lion, dkk, (2018) “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Eksektif, Vol 1 No.1*

Warno, (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat, Jurnal STIE Semarang, Vol 8 No. 2

Website desa, dalam <http://penyangkringan.desa.id/public/menu/profil>

Widayani, Hanna, (2018)“Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori ashabiyyah)”, *Jurnal Manthiq, Vol 3 No 2*, hlm 9

Widiawwati, “Data Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian” dalam, <https://penerbitbukudeepublish.com> ,

Yalti, Meisy Egi (2020) “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah,” skripsi: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, hlm 18.

Zulhakiki. (2021) “Tata Kelola Pemerintah dan Pemimpin dalam Perspektif Islam” dalam <https://kumparan.com/>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 (kuesioner)

#### IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk: beri tanda (  $\surd$  ) pada kolom jawaban yang sesuai

Nama responden :

Umur :

Alamat :

Organisasi yang diikuti :  Takmir mushola / masjid

PKK

Karang taruna

Irmis

Kader Desa

Lainnya: \_\_\_\_\_

Jabatan :

#### PETUNJUK PENGISIAN

Petunjuk Pengisian:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Deskripsi:

Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah desa yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik (sosial). Pembangunan fisik meliputi pembangunan jalan, pasar, tempat ibadah dll, dan pembangunan sosial meliputi pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi, pengembangan pendidikan dan kesehatan untuk tujuan meningkatkan sumber daya manusianya.

## DAFTAR PERNYATAAN

### AKUNTABILITAS

No.	DESKRIPSI	SS	S	N	TS	STS
1.	a. Proses pembangunan desa baik fisik maupun non fisik (pembangunan sosial) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama					
	b. Program-program yang dilakukan pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
2.	a. Pemerintah desa mematuhi prosedur dalam program pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial					
	b. Pemerintah desa merespon dengan cepat keluhan masyarakat terkait pembangunan desa					
3.	a. Pemerintah desa patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar					

	1945					
	b. Pemerintah desa jujur dalam mengelola program pembangunan desa termasuk dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan dananya					

## TRANSPARANSI

No.	DESKRIPSI	SS	S	N	TS	STS
1.	a. Pemerintah desa mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan					
	b. Pemerintah desa menyampaikan kebijakannya secara tertulis mengenai program-program yang dijalankan kepada masyarakat					
2.	a. Pemerintah desa memaparkan secara lengkap semua aktivitas alokasi dana desa kepada masyarakat					
	b. Laporan keuangan desa yang diterbitkan oleh pemerintah sudah benar dan dapat dijadikan informasi yang akurat					
3.	a. Dalam situs web desa terdapat laporan keuangan yang mudah untuk diakses					
	b. Pemerintah desa menyediakan platform tersendiri dalam menyediakan laporan keuangan dan terbatas untuk umum					
4.	a. Dalam menyampaikan laporan alokasi dana desa pemerintah selalu mencantumkan dokumen					

	pendukung seperti faktur penjualan, dsb					
	b. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pemerintah selalu melakukan dokumentasi seperti foto maupun video sebagai bukti terlaksananya kegiatan					

### KEPEMIMPINAN

No.	DESKRIPSI	SS	S	N	TS	STS
1.	a. Dalam mengambil keputusan pemerintah desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat					
	b. Keputusan yang diambil pemerintah desa selalu minim risiko dan disetujui masyarakat					
2.	a. Pemerintah desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial					
	b. Sikap pemerintah desa dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tanggap terhadap lingkungan sekitar.					
3.	a. Pemerintah desa dapat menjelaskan dengan baik mengenai maksud dan tujuan dari program-program pembangunan desa					
	b. Pemerintah desa dalam menyampaikan informasi selalu mudah dimengerti masyarakat sehingga jarang menimbulkan <i>mis communication</i>					

	(proses komunikasi tidak berjalan lancar)					
4.	a. Pemerintah desa memiliki sikap tanggungjawab terhadap keberhasilan program pembangunan desa					
	b. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah desa.					

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

No.	DESKRIPSI	SS	S	N	TS	STS
1.	a. Saya aktif dalam kegiatan yang ada di desa					
	b. Saya tertarik untuk ikut serta mengawal jalannya pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan penilaian hasil					
2.	a. Saya bersedia membantu pelaksanaan pembangunan desa karena saya sadar keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan					
	b. Jika memang dibutuhkan saya bersedia memberikan sumbangan berupa uang, pemikiran, keahlian maupun tenaga					
3.	a. Saya merasakan manfaat dari pembangunan desa seperti manfaat tersedianya sarana dan prasarana, manfaat sosial, pendidikan dan kesehatan					

	b. Saya akan menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah desa dengan baik					
4.	a. Saya bersedia ikut mengawasi jalannya pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun sosial sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal					
	b. Saya akan menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa apabila fasilitas yang disediakan kurang bisa dirasakan manfaatnya					

## Lampiran 2 (Tabulasi Data)

Variabel X1 Akuntabilitas

Akuntabilitas						Total
1	2	3	4	5	6	
4	3	4	5	5	5	26
3	4	3	3	3	3	19
4	4	4	5	4	5	26
4	4	4	5	4	5	26
4	5	4	4	4	3	24
4	4	3	4	4	3	22
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	3	4	3	21
4	4	4	3	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	3	4	4	23
5	4	4	4	5	5	27
5	4	4	4	4	4	25

5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	5	4	5	28
5	4	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	5	25
5	5	4	3	3	3	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	3	3	3	3	3	19
5	5	5	3	3	2	23
5	4	4	5	4	4	26
4	5	5	3	3	4	24
3	3	3	3	4	3	19
4	4	5	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	3	3	3	3	3	19
5	5	4	5	4	5	28
4	4	5	5	4	5	27
5	3	5	3	3	5	24
4	4	5	4	5	3	25
5	4	3	3	4	3	22
5	5	4	5	5	5	29
4	4	4	4	4	5	25

4	4	5	5	5	5	28
5	2	4	4	4	3	22
4	3	3	4	3	3	20
3	4	4	5	4	5	25
5	5	5	4	5	4	28
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	5	5	29
5	4	5	5	5	5	29
5	4	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	4	25
4	4	3	3	4	4	22
5	4	4	4	4	4	25
4	4	5	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	4	25
5	5	3	4	4	4	25
4	5	4	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	3	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	5	27
5	5	4	4	4	4	26
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
3	3	3	4	4	3	20
5	5	5	5	5	5	30

4	4	4	4	3	3	22
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	5	24
4	4	4	5	5	5	27
4	4	3	5	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	4	4	27
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	5	5	5	27
5	5	4	4	4	4	26
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	5	5	25
5	5	5	4	3	4	26
5	4	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	5	4	5	26
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	5	5	26
5	5	4	4	4	4	26

Variabel X2 Transparansi

Transparansi							Total
1	2	3	4	5	6	7	

3	3	5	4	3	3	4	25
4	3	3	2	3	3	4	22
4	4	4	4	3	3	5	27
4	4	4	4	3	3	5	27
5	4	3	4	4	3	5	28
4	4	4	2	3	3	5	25
4	4	4	3	3	4	4	26
4	3	3	3	2	3	4	22
3	3	3	3	3	3	3	21
5	4	5	4	5	5	5	33
4	4	4	3	3	4	4	26
4	4	4	4	4	5	5	30
5	5	5	4	4	5	5	33
5	5	5	4	4	5	5	33
5	5	4	4	5	4	4	31
3	3	3	4	4	4	4	25
5	5	5	4	4	4	4	31
5	5	5	4	4	4	4	31
2	4	4	5	5	2	5	27
5	5	5	4	3	5	4	31
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	3	27
5	5	4	3	4	4	5	30
5	5	5	4	4	4	4	31
4	4	5	4	4	4	4	29
3	4	4	3	3	4	4	25
4	5	5	4	4	5	5	32
5	5	5	5	5	5	5	35
3	4	4	3	3	3	3	23
3	4	4	4	3	5	5	28

4	5	5	5	4	3	5	31
5	5	4	4	4	5	5	32
4	4	3	3	2	3	4	23
5	5	5	5	5	4	3	32
5	5	5	5	5	5	5	35
3	3	3	3	3	3	3	21
5	5	5	5	4	5	4	33
5	5	5	5	5	4	5	34
5	5	5	5	5	4	5	34
3	5	4	3	3	4	5	27
4	4	4	3	3	4	4	26
4	4	5	5	5	4	5	32
4	3	4	4	4	4	4	27
5	2	4	5	5	5	5	31
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	5	1	1	3	5	23
2	4	5	2	1	4	5	23
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	5	4	1	2	4	25
4	5	5	4	4	5	5	32
3	4	4	4	3	3	4	25
3	4	4	4	3	3	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	5	5	5	5	4	32
4	4	4	4	4	4	5	29
4	4	4	4	3	4	5	28
4	4	3	3	4	4	4	26
5	5	5	5	5	5	5	35

4	4	4	4	3	5	5	29
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	5	29
5	5	5	5	5	4	5	34
4	4	4	3	3	4	4	26
5	5	5	3	3	4	4	29
5	5	5	5	5	5	4	34
4	4	3	3	3	4	5	26
5	2	3	3	3	3	3	22
4	5	4	4	5	5	5	32
4	4	4	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	5	5	3	5	5	32
4	4	4	3	4	4	4	27
5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	5	5	5	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	3	3	3	4	4	27
4	4	5	5	5	5	5	33
5	5	5	5	5	4	4	33
4	4	4	4	4	3	3	26
5	5	3	3	3	4	4	27
4	5	5	5	3	4	4	30
5	5	4	4	4	4	4	30
4	5	5	5	5	4	4	32
5	5	5	5	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	3	4	32

4	4	4	4	4	4	5	29
4	4	3	5	5	5	5	31
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	4	4	4	4	4	26
5	5	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	4	4	4	32
5	5	5	3	3	3	3	27
4	4	4	4	4	5	5	30

Variabel X3 Kepemimpinan

Kepemimpinan								Total
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	3	3	4	4	3	4	4	30
4	2	3	3	4	4	4	3	27
5	3	5	4	4	3	4	4	32
5	3	5	4	4	3	4	4	32
4	2	4	3	4	3	3	4	27
4	3	3	3	4	4	4	4	29
5	4	4	5	4	4	4	5	35
4	2	3	3	3	3	4	5	27
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	5	5	4	5	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	4	4	5	5	35
5	2	5	5	4	4	5	5	35
5	2	5	5	4	4	5	5	35
4	4	4	5	4	5	5	5	36
4	4	4	5	4	5	4	4	34
4	4	4	5	4	5	4	4	34

4	4	4	5	4	5	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	4	4	4	4	33
3	5	5	5	3	5	5	4	35
5	4	4	4	5	4	5	5	36
5	4	4	4	5	4	4	5	35
4	4	5	4	4	4	3	4	32
5	3	4	4	5	5	5	5	36
5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	3	4	4	4	3	3	3	27
4	4	4	4	5	4	4	5	34
4	3	4	4	5	5	2	4	31
5	4	4	4	5	5	5	5	37
4	3	3	3	3	3	4	3	26
5	4	5	5	5	5	4	5	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	4	3	4	4	5	4	5	34
4	3	4	4	4	4	4	4	31
5	5	3	5	3	5	4	5	35
3	3	4	4	4	4	3	4	29
5	4	5	4	4	4	4	5	35
5	3	5	5	5	5	5	5	38
4	3	3	3	4	3	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	3	3	3	4	4	4	4	28
4	3	2	4	2	4	2	2	23
4	3	4	5	4	4	4	5	33

5	4	4	5	4	4	5	5	36
5	4	4	5	5	5	5	5	38
4	5	5	3	3	3	3	5	31
5	4	5	5	5	5	5	5	39
4	4	4	3	3	3	3	3	27
4	4	4	3	3	3	4	4	29
5	5	4	4	4	4	4	5	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	5	4	4	4	33
5	4	3	3	3	4	4	4	30
3	4	4	3	4	4	4	4	30
4	3	3	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	3	4	4	4	35
5	5	5	4	3	3	4	4	33
4	5	5	5	3	5	5	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	3	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	5	5	5	5	3	4	4	36
3	3	3	4	4	4	5	4	30
4	4	4	2	4	4	4	4	30
5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	5	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	4	4	38
4	4	4	5	5	3	4	4	33

4	3	3	4	4	4	4	4	30
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	3	3	3	3	3	3	26
5	5	3	3	3	3	3	3	28
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	5	5	4	34
4	4	3	4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	5	3	3	3	31
4	5	5	5	5	3	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	2	5	3	5	5	5	4	34
4	5	4	4	4	5	5	5	36
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	5	5	5	5	37
4	4	3	3	4	4	5	5	32
3	3	3	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	5	4	4	4	37

Variabel Y Partisipasi Masyarakat

Partisipasi								Total
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	4	4	4	5	4	3	3	30
3	4	4	4	3	4	3	3	28
3	4	4	4	3	4	3	3	28
2	4	4	5	5	5	4	4	33

3	4	4	4	3	4	3	3	28
3	3	3	3	4	3	3	3	25
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	5	4	4	5	34
5	5	5	4	5	5	5	5	39
4	4	3	4	3	3	3	4	28
3	3	4	3	4	4	3	4	28
4	4	4	4	4	4	4	5	33
4	4	4	5	5	5	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	5	5	5	5	5	3	5	36
4	3	4	4	4	4	4	4	31
4	3	4	4	4	4	4	4	31
5	4	3	4	4	4	4	4	32
3	3	4	4	4	4	4	5	31
4	5	4	4	4	4	4	4	33
3	3	5	5	5	5	5	5	36
4	4	4	4	4	4	5	4	33
5	4	5	4	4	3	3	5	33
3	4	4	4	4	4	4	4	31
3	3	3	5	4	5	3	3	29
2	3	4	5	4	4	4	5	31
4	4	4	4	5	5	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	3	4	3	4	3	29
3	3	4	3	4	5	5	5	32
4	3	4	5	5	5	4	4	34
4	5	5	4	5	4	5	5	37
3	4	4	4	3	4	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	4	33

5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	4	4	4	5	4	4	31
3	4	4	3	4	4	3	3	28
3	4	4	3	4	4	5	5	32
4	4	5	5	4	4	5	4	35
5	5	5	4	4	5	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	5	5	5	3	5	5	5	38
4	4	4	4	4	4	5	5	34
5	4	4	4	5	5	5	5	37
4	3	4	3	3	3	3	4	27
4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	5	4	4	5	5	5	5	37
5	4	5	3	3	4	5	4	33
4	4	4	4	4	5	5	5	35
4	4	3	3	4	3	3	3	27
5	3	4	3	3	3	3	4	28
3	4	4	3	4	4	5	5	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	4	4	4	4	4	4	30
4	3	4	4	5	4	4	4	32
4	4	4	5	4	3	4	5	33
4	4	4	4	5	4	5	5	35
4	5	4	4	5	3	5	5	35
5	4	5	5	5	5	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	3	4	5	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40

4	4	5	5	5	5	5	5	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	5	5	5	5	37
4	4	4	4	4	4	5	5	34
4	4	3	3	3	5	5	5	32
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	4	39
4	4	3	3	3	3	3	4	27
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	3	3	3	34
4	4	4	4	4	4	3	5	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	3	3	3	29
5	5	5	4	4	4	4	4	35
5	4	4	4	5	3	4	4	33
4	4	4	4	4	3	3	3	29
5	5	3	4	4	4	4	4	33
4	4	5	5	5	5	5	5	38
4	4	3	4	4	4	5	5	33
4	4	4	3	3	3	3	3	27
5	5	5	5	5	5	4	4	38
5	4	4	3	4	4	4	4	32
3	3	3	3	4	5	3	3	27
4	4	4	4	4	4	4	3	31
4	4	4	4	4	5	5	5	35
4	4	3	3	4	4	4	4	30
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	4	4	4	4	4	4	34
4	5	4	4	5	4	4	4	34

4	4	3	3	3	3	4	4	28
5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	4	4	5	4	4	4	4	34
4	4	4	5	5	5	5	4	36

### Lampiran 3 output SPSS uji statistik deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	98	11	19	30	2518	25.69	2.797
Transparansi	98	14	21	35	2839	28.97	3.773
Kepemimpinan	98	17	23	40	3244	33.10	3.988
Partisipasi	98	16	24	40	3213	32.79	3.764
Valid N (listwise)	98						

### Lampiran 4 output SPSS uji validitas

Variabel X1 Akuntabilitas

#### Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total_X1
Pearson Correlation	1	.520**	.485**	.271**	.148	.159	.579**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.007	.146	.117	.000
N	98	98	98	98	98	98	98

X1.2	Pearson	.520**	1	.476**	.329**	.205*	.237*	.636**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.043	.019	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X1.3	Pearson	.485**	.476**	1	.471**	.349**	.419**	.746**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X1.4	Pearson	.271**	.329**	.471**	1	.590**	.687**	.806**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.007	.001	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X1.5	Pearson	.148	.205*	.349**	.590**	1	.613**	.698**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.146	.043	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X1.6	Pearson	.159	.237*	.419**	.687**	.613**	1	.762**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.117	.019	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
Total_X	Pearson	.579**	.636**	.746**	.806**	.698**	.762**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1	N	98	98	98	98	98	98	98

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel X2 Transparansi

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total_X 2
X2.1	Pearson	1	.525**	.351**	.347**	.436**	.395**	.124	.653**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.224	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.2	Pearson	.525**	1	.616**	.390**	.302**	.345**	.266**	.691**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.001	.008	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.3	Pearson	.351**	.616**	1	.520**	.336**	.356**	.266**	.695**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000	.008	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.4	Pearson	.347**	.390**	.520**	1	.762**	.426**	.268**	.793**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.008	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.5	Pearson	.436**	.302**	.336**	.762**	1	.504**	.241*	.776**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.001	.000		.000	.017	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.6	Pearson	.395**	.345**	.356**	.426**	.504**	1	.463**	.716**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.7	Pearson	.124	.266**	.266**	.268**	.241*	.463**	1	.513**
	Correlation								

	Sig. (2-tailed)	.224	.008	.008	.008	.017	.000		.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Total_X	Pearson	.653**	.691**	.695**	.793**	.776**	.716**	.513**	1
	Correlation								
2	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel X3 Kepemimpinan

**Correlations**

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Total_ X3	
X3.1	Pearson	1	.346**	.444**	.399**	.373**	.234*	.359**	.458**	.638**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.020	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.2	Pearson	.346**	1	.431**	.414**	.155	.284**	.211*	.233*	.581**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.128	.005	.037	.021	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.3	Pearson	.444**	.431**	1	.576**	.462**	.312**	.380**	.419**	.730**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.002	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.4	Pearson	.399**	.414**	.576**	1	.443**	.546**	.440**	.450**	.774**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.5	Pearson	.373**	.155	.462**	.443**	1	.441**	.451**	.514**	.677**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.128	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.6	Pearson	.234*	.284**	.312**	.546**	.441**	1	.566**	.524**	.698**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.020	.005	.002	.000	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98

X3.7	Pearson	.359**	.211*	.380**	.440**	.451**	.566**	1	.690**	.721**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.037	.000	.000	.000	.000		.000	.000
X3.8	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	Pearson	.458**	.233*	.419**	.450**	.514**	.524**	.690**	1	.752**
	Correlation									
Total_	Sig. (2-tailed)	.000	.021	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	Pearson	.638**	.581**	.730**	.774**	.677**	.698**	.721**	.752**	1
X3	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Variabel Y Partisipasi Masyarakat

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total_
		Y								
Y.1	Pearson	1	.584**	.396**	.235*	.217*	.071	.290**	.204*	.557**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.020	.032	.486	.004	.044	.000
Y.2	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	Pearson	.584**	1	.483**	.364**	.337**	.208*	.334**	.249*	.647**
	Correlation									
Y.3	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.039	.001	.014	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	Pearson	.396**	.483**	1	.577**	.468**	.398**	.393**	.366**	.735**
Y.3	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000

	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Y.4	Pearson	.235*	.364**	.577**	1	.585**	.510**	.335**	.316**	.712**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.020	.000	.000		.000	.000	.001	.002	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Y.5	Pearson	.217*	.337**	.468**	.585**	1	.495**	.430**	.371**	.710**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.032	.001	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Y.6	Pearson	.071	.208*	.398**	.510**	.495**	1	.545**	.400**	.668**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.486	.039	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Y.7	Pearson	.290**	.334**	.393**	.335**	.430**	.545**	1	.717**	.752**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Y.8	Pearson	.204*	.249*	.366**	.316**	.371**	.400**	.717**	1	.672**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.044	.014	.000	.002	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Total_	Pearson	.557**	.647**	.735**	.712**	.710**	.668**	.752**	.672**	1
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
Y	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 5 output SPSS uji reliabilitas**

**Variabel X1**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.800	.798	6

**Variabel X2**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.821	.819	7

**Variabel X3**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
------------------	--	------------

.845	.849	8
------	------	---

### Variabel Y

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.833	.836	8

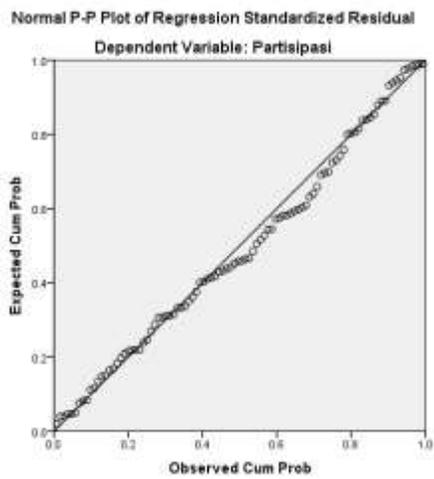
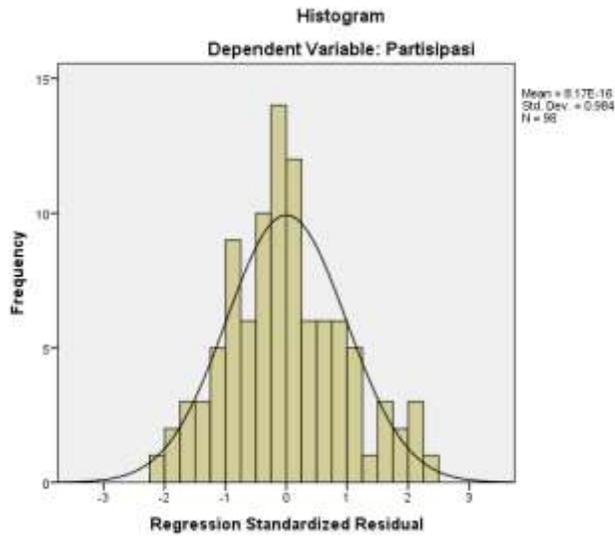
Lampiran 6 output SPSS uji normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.45280214
	Absolute	.073
Most Extreme Differences	Positive	.073
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.723
Asymp. Sig. (2-tailed)		.672

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 7 output SPSS uji multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	18.339	3.650		5.025	.000		
1 Akuntabilitas	.091	.163	.067	.555	.580	.610	1.639
Transparansi	.134	.115	.134	1.165	.247	.673	1.486

Kepemimpina n	.249	.116	.264	2.137	.035	.588	1.701
------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Partisipasi

### Lampiran 8 output SPSS uji heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.800	2.196		2.641	.010
1 Akuntabilitas	.067	.098	.088	.684	.496
Transparansi	-.024	.069	-.042	-.342	.733
Kepemimpina n	-.125	.070	-.234	-1.782	.078

a. Dependent Variable: ABS\_RES

### Lampiran 9 output uji regresi linier berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.339	3.650		5.025	.000
1 Akuntabilitas (X1)	.091	.163	.067	.555	.580
Transparansi (X2)	.134	.115	.134	1.165	.247
Kepemimpinan (X3)	.249	.116	.264	2.137	.035

a. Dependent Variable: Partisipasi (Y)

**Lampiran 10 output SPSS Uji Koefisien Determinan**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.398 <sup>a</sup>	.159	.132	3.50747

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan (X3),  
Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

**Lampiran 11 output SPSS Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18.339	3.650	.067	5.025	.000
	Akuntabilitas (X1)	.091	.163	.134	.555	.580
	Transparansi (X2)	.134	.115	.264	1.165	.247
	Kepemimpinan (X3)	.249	.116		2.137	.035

a. Dependent Variable: Partisipasi (Y)

Lampiran 12 Surat ijin penelitian



**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor: 145/285/PENYK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ARIS SUPRIYANTO  
Jabatan : Kepala Desa Penyangkringan

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : TIARA FAIKHA SUCI  
NIM/NIRM : 1705046042  
Semester : VIII  
Alamat : Kedonsari Rt 003 Rw 013 Desa Penyangkringan Kec. Weleri  
Prodi : S1 Akuntansi Syariah

Pengambilan Data Penelitian di Desa Penyangkringan Kec. Weleri Kab. Kendal untuk Penyusunan Skripsi dengan judul " PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA, DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT "

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyangkringan, 26 Juli 2021  
Kepala Desa Penyangkringan  
  
ARIS SUPRIYANTO

## Lampiran 13 Profil Desa

### Kondisi Geografis Desa

Secara geografis desa Penyangkringan terletak dibagian selatan Kecamatan Weleri kabupaten Kendal dengan luas wilayah lebih kurang 177,850 KM<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

<b>BATAS DESA</b>	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan desa Nawangsari, Desa Karangdowo
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Sidomukti
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Bumiayu
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Penaruban

### Kondisi Infrastruktur Desa

Pembangunan Desa yang berkaitan dengan Infrastruktur adalah mempermudah masyarakat desa dalam mengakses sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan Desa Penyangkringan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

#### **Sarana dan Prasarana Pemerintahan**

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Penyangkringan mempunyai 58 RT dikepalai oleh Ketua RT dan 17 RW dikepalai oleh Ketua RW. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

#### **Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Penyangkringan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel**

No	Uraian	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Puskesmas	-	-	-
2	Puskesmas Pembantu/PKD	1	1	1
3	Tenaga medis di puskesmas	2	2	3
4	Tenaga Non Medis di puskesmas	2	3	3
5	Toko obat dan Jamu	1	2	2
6	Apotik	2	3	5
7	Dokter umum	3	3	3
8	Dokter Gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-
10	Mantri kesehatan	2	2	2
11	Bidan	3	3	4
12	Dukun bayi berijazah	3	3	3
13	Posyandu	4	4	4

**Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan**

*Sumber : Profil Desa*

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Penyangkringan ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 1 km atau 15 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 menit

**Sarana Dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Penyangkringan mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian:

**Tabel**

**Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sarana Prasarana</b>	<b>Nama Sarana Prasarana</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah Siswa</b>
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ngesti Rahayu 1,2 dan 3	Dusun Sekepel, Kendayaan, Krajan	200 Siswa
2	TK	Tunas Harapan Bangsa	Dusun Sekepel	50 Siswa
3	SD Negeri	SDN 1 , 3 , 4	Dsun Krajan	800 Siswa
		SDN 2	Dusun Sekepel	300 Siswa
4	SMP / MTs			
5	SMU	SMU Theresiana	Dusun Kendayaan	150 Siswa
6		SMA Muhamadiyah	Dusun Kedonsari	600 siswa

**Sarana dan Prasarana Keagamaan**

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Penyangkringan mempunyai masjid dan mushola di tiap Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel**

**Sarana Prasarana Keagamaan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sarana Prasarana</b>	<b>Nama Sarana Prasarana</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi</b>
1	Masjid	5 unit		Baik

2	Mosholla	22 unit		Baik
---	----------	---------	--	------

### **Sarana dan Prasarana Umum**

Sarana Prasarana Desa berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa, dengan adanya Dana Desa dari tahun 2018- 2020 maka Pemerintah Desa telah membangun beberapa prasarana dan sarana Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, jumlah Prasarana dan sarana desa tertuang dalam tabel berikut.

### **Tabel**

#### **Jumlah prasarana dan sarana desa**

#### **Tahun 2018-2020**

<b>No</b>	<b>Jenis prasarana &amp; sarana desa</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
1	Jalan ber aspal	22 km	25 km	30 km
2	Jalan Rabat Beton	10	16	24
3	Jalan berbatu/tanah	10 km	9 km	8 km
4	Jembatan kecil	30 bh	40 bh	50 bh
5	Jembatan sedang/besar	4 bh	5 bh	5 bh
6	Bendungan	1 bh	1 bh	1 bh
7	Jaringan irigasi	12,475 km	12,475 km	12,475 km

### **Kondisi Pemerintahan Desa**

#### **Pembagian Wilayah Desa**

Luas wilayah Desa Penyangkringan dengan luas wilayah 177,850 ha. Desa Penyangkringan terdiri dari 4 dusun yaitu: Dusun Sekepel, Dusun Kendayaan, Dusun Krajan dan Dusun Kedonsari

Dan untuk Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Penyangkringan terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi

Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 4 Kepala Dusun. Desa Penyangkringan terdiri dari 17 Rukun Warga (RW) dan 58 Rukun Tangga (RT).

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

**Nama Pejabat Pemerintah Desa Penyangkringan sebagai berikut :**

1	Kepala Desa	Aris Supriyanto
2	Sekretaris Desa	Wilujeng Ika Purbosari, S.H
3	Kaur Umum dan perencanaan	Ponco Susilo, S.Sos
4	Kaur Keuangan	Eko Wigiyanti
5	Kasi Kesejahteraan	Setyo Budi Santoso
6	Kasi Pelayanan	Zuhdi Ahsani
7	Kasi Pemerintahan	Prayitno
8	Kadus Sekepel	Agus Suwito
9	Kadus Kendayaan	Muniri
10	Kadus Krajan	Suyatno
11	Kadus Kedonsari	Agus Asbariyanto

**Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa :**

Susunan Kepengurusan BPD Desa Penyangkringan sebagai berikut :

1	Ketua	Hastoro imam H.S
2	Wakil Ketua	Soepriyanto
3	Sekretaris	Agus Wiyarso
4	Anggota	Ida Noor Setyowati
5	Anggota	Efendi Ombi
6	Anggota	Triyono
7	Anggota	Bambang Sujarnomo

## Lampiran 14

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Tiara Faikha Suci

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 1 Januari 1999

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kedonsari, RT.03 RW.013, Ds.Penyangkringan, Kec.Weleri,  
Kab. Kendal

Nomor telepon/ HP : 087735466769

Email : [tiaraaikha01@gmail.com](mailto:tiaraaikha01@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. TK Tarbiatul Athfal    | Tahun 2003 – 2005 |
| 2. SD N 1 Penaruban       | Tahun 2005 _ 2011 |
| 3. SMP N 1 kaliwungu      | Tahun 2011 – 2014 |
| 4. SMA N 1 Kaliwungu      | Tahun 2014 – 2017 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2017 – 2021 |

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2021



Tiara Faikha Suci

**Lampiran 15**  
**Dokumentasi**

